

**PEMBAGIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
SEBAGAI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

(Studi Kasus Kecamatan Serbajadi)

SKRIPSI



Disusun oleh:

Jainatul Mawarni

NIM. 190801018

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023 M / 1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jainatul Mawarni

NIM : 190801018

Prodi : Ilmu Politik

Universitas : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Menyatakan,



Handwritten signature of Jainatul Mawarni.

Jainatul Mawarni

**PEMBAGIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
SEBAGAI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

(Studi Kasus Kecamatan Serbajadi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

Jainatul Mawarni

NIM . 190801018

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Aklima, S.Fil., M.A

NIP. 198810062019032009

Pembimbing II

Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A

NIP. 198605132019031006

**PEMBAGIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
SEBAGAI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS KECAMATAN SERBAJADI)**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Serahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Jainatul Mawani

NIM. 190801018

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 21 Juli 2023

03 Muharram 1445 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Aklima, S.Fil., M.A
NIP. 198810062019032009

Sekretaris,

Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 198605132019031006

Penguji I,

Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

Penguji II,

Melly Masni, M.I.R.
NIP. 199308242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berbentuk uang tunai yang disalurkan melalui kartu KPM PKH. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial. Di Kecamatan Serbajadi ada sebanyak 450 Kartu Keluarga yang menerima PKH pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 ada sebanyak 456 kartu keluarga. Hal ini membuktikan bahwasannya meningkatnya angka penerima PKH. PKH memiliki tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan sekaligus meningkatkan investasi sumber daya manusia pada generasi mendatang dengan meningkatkan Kesehatan anak dan kualitas Pendidikan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serbajadi. Metode penelitian yang dilakukan yakni berupa pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara dengan informan yang bersangkutan untuk mengetahui keadaan kemiskinan serta pengaruh PKH di Kecamatan Serbajadi. Hasil penelitian yang didapatkan bahwasannya PKH ini berhasil sebagai program penanggulangan kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kecamatan hampir 95% kehidupan masyarakat mulai terpenuhi dan berubah mulai dari segi Pendidikan anaknya dan juga hampir rata-rata ekonomi masyarakat terpenuhi serta anaknya juga bisa bersekolah dengan adanya bantuan PKH tersebut dan juga jumlah anak sekolah di Serbajadi meningkat dari tahun 2015-2022. Dilihat dari teori penanggulangan kemiskinan yang digunakan oleh World Bank yaitu dengan meningkatkan investasi sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan. Meskipun begitu angka kemiskinan yang ada di Serbajadi mencapai 47,7%, hal ini disebabkan karena masih banyaknya dari masyarakat yang bersikeras untuk masuk ke dalam kategori miskin. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya factor kemiskinan yang hadir dimasyarakat masih disebabkan karena factor internal masyarakat sendiri sedangkan dari segi PKH sendiri berhasil meningkatkan kualitas Pendidikan anak.

Keyword : *Program Bantuan, PKH, Penanggulangan Kemiskinan, Kecamatan Serbajadi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, hidayat beserta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pembagian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Serbajadi)”. Shalawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan beserta para sahabat yang telah berjuang Bersama Nabi dalam menyebarkan agama Islam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Pada penulisan Skripsi ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan, bimbingan serta dorongan yang penulis dapat dari berbagai pihak, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Sarbuddin, yang telah memberikan besar motivasi dan semangat tiada henti untuk penulis dalam melaksanakan kuliah hingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar Sarjana. Terima kasih atas doa dan supportnya karena tidak pernah melarang penulis dalam memilih segala bentuk Pendidikan yang penulis inginkan. Terima kasih telah menuntunku mengarungi dunia yang kian pelik, mengasihiku dengan hal-hal yang membahagiakan walau harus jungkir balik.
2. Ibu tercinta, Juniar, terima kasih telah melahirkan aku ke dunia, terima kasih telah membawaku kepada pada ajaran-ajaran yang baik. Terima kasih atas

nasihat yang selalu diberikan saat penulis sempat merasa down saat melaksanakan kuliah, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi sifat keras kepala penulis, terima kasih telah menjadi penguat paling hebat saat penulis melaksanakan penulisan Skripsi ini.

3. Kepada ketiga abang penulis (M.Tahir, Marhaban dan Sahidan) dan adik saya (Jainuddin Ansari) yang telah memberikan semangat, waktu dan support bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa banyak-banyak terima kasih yang mungkin tak tertampung untuk kalian.
4. Bapak Dr. Muji, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Ibu Aklima, S.Fil., M.A. selaku pembimbing I yang telah memberikan saran sekaligus waktunya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
6. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Bapak Eka Januar, M.Soc. Sc Selaku Penasihat akademik (PA), yang telah memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dalam segala persoalan akademik.

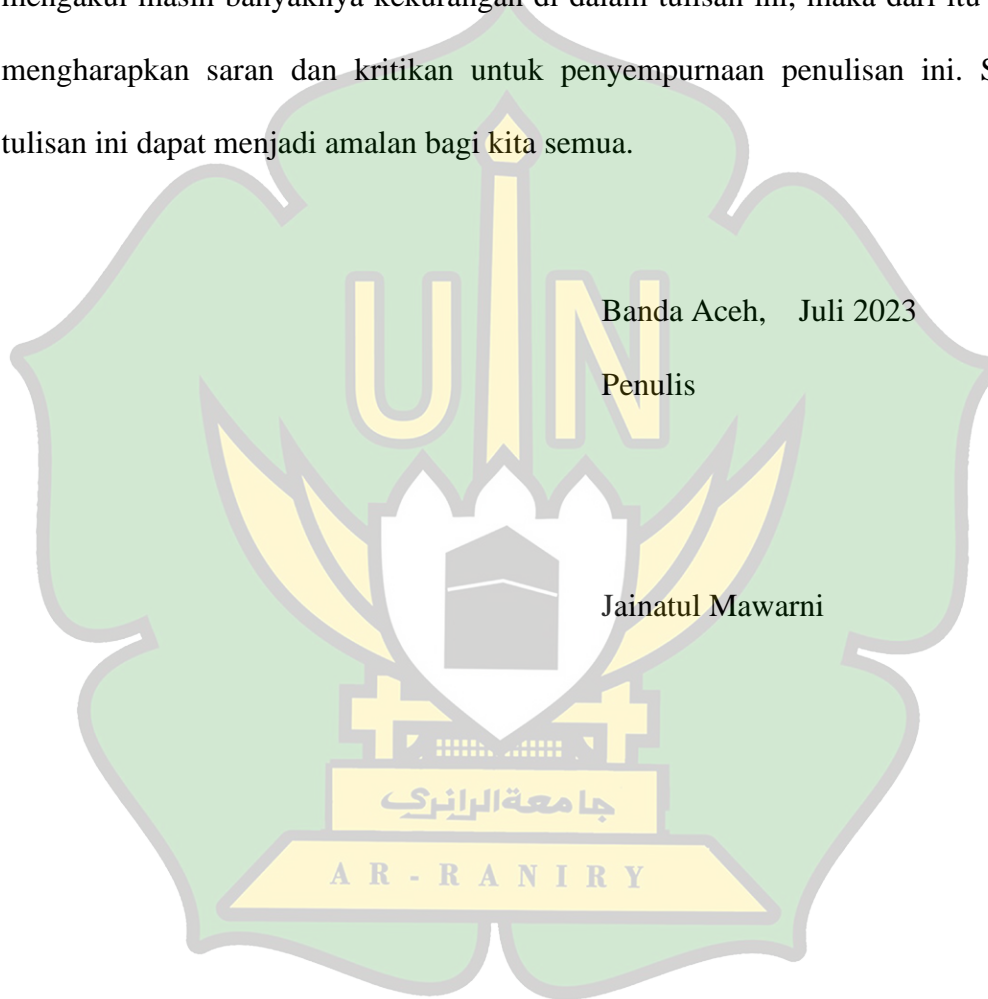
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas selama ini serta seluruh karyawan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
9. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis informasi terkait penelitian yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Eka Fitri Maghfirah, Imelda Natsya, Fatimah Juhra, Rina Ariani H, Riska Mawarni, Amalia Fitri, Gebrina Rizki dan seluruh keluarga Have Fun yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulisan dari awal proposal hingga akhir. Terima kasih atas segala waktu, bantuan support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 19 yang telah berperan dalam banyak memberikan pengalaman serta pembelajaran selama di bangku perkuliahan serta Seluruh pihak yang telah yang ikut serta memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baiknya.
12. Kepada diri sendiri, yang telah berjuang selama ini dalam melaksanakan kuliah dari 2019 hingga 2023, terima kasih sudah masih bertahan sampai saat ini dan tidak pernah menyerah serta tetap waras dalam kondisi apapun sampai mampu berada di titik ini. Mawar, *you know, it's not always easy, but that's life, be strong cause there are better days ahead.*

Hanya dengan iringan doa penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Sesungguhnya penulis tidak bisa membalas semua kebaikan yang telah keluarga, Bapak/Ibu serta kawan-kawan berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis mengakui masih banyaknya kekurangan di dalam tulisan ini, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan untuk penyempurnaan penulisan ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi amalan bagi kita semua.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

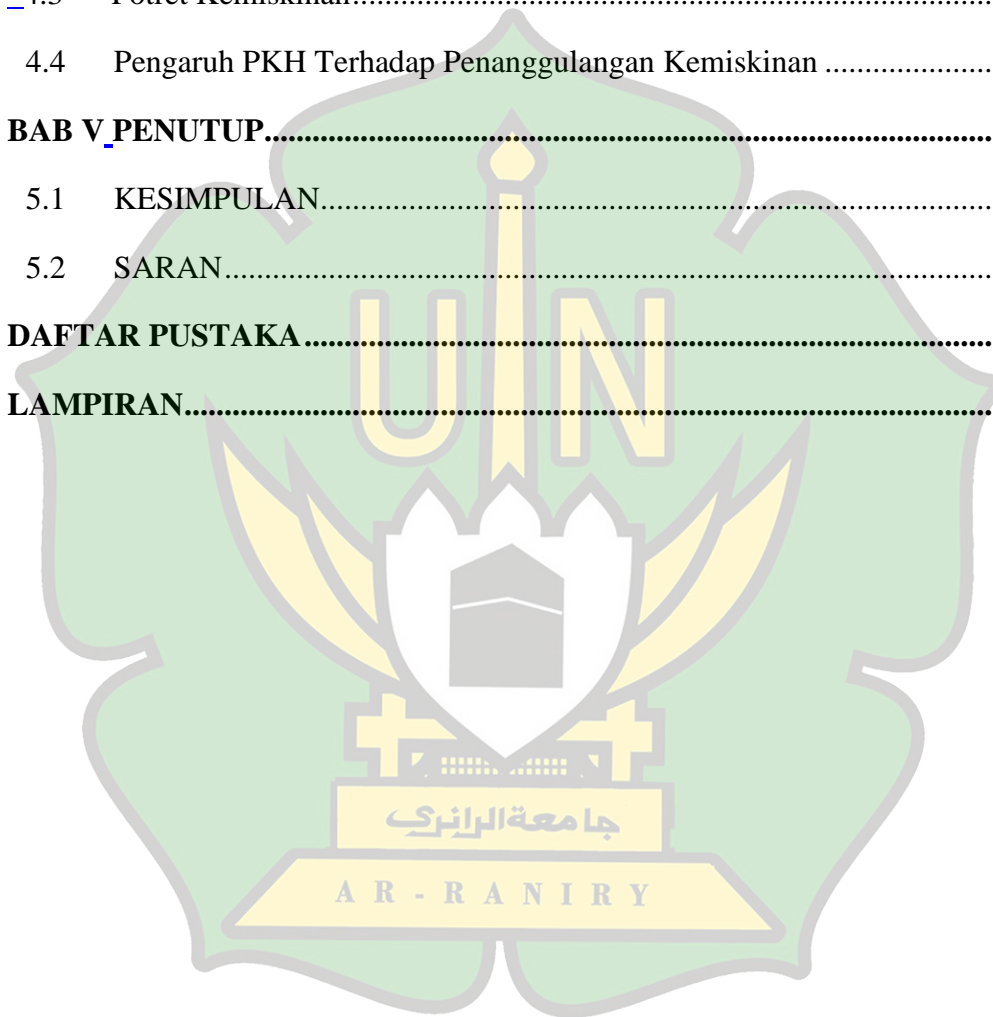
Jainatul Mawarni



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Teori Kemiskinan.....	15
2.2.2 Kemiskinan Kultural.....	18
2.2.3 Kemiskinan Struktural	20
2.2.4 Penanggulangan Kemiskinan.....	21
2.2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
4.1. Potret Kecamatan Serbajadi	35

4.1.1.	Sejarah Kecamatan Serbajadi.....	35
4.1.2.	Letak Geografis.....	36
4.1.3.	Demografi	37
4.2	Budaya Masyarakat	44
4.3	Potret Kemiskinan.....	48
4.4	Pengaruh PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan	56
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	KESIMPULAN.....	67
5.2	SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN.....		78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia semakin gencar dilakukan oleh pemerintah, ada banyak berbagai macam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan pada masa pandemi lalu juga diberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako. Diberikannya banyak program bantuan sosial sebagai pengentas kemiskinan juga berfungsi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.¹ Bantuan program pemerintah telah ada sejak dahulu yaitu pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan tersebut maka dapat memperbaiki keadaan kemiskinan yang melanda di Indonesia. Karena pada dasarnya tujuan utama dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa akan ada, baik di negara maju maupun berkembang. Kemiskinan lazim didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam mencukupi berbagai kebutuhan, mulai dari sandang, pangan dan papan. Pada titik tertentu, ketidakmampuan tersebut tidak hanya ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga; orang yang benar-benar

¹.Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*, Vol. 4, No. 1, PROSIDING KS: Riset & PKM ,hlm. 88.

miskin bahkan tidak bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri. Namun, dalam sudut pandang Islam, miskin juga bisa disebut sebagai miskin tentang keagamaan duniawi dan akhirat. Kemiskinan juga merupakan suatu keadaan serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun non pokok.²

Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi negara, di antara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi negara untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman.

Persentase miskin di Indonesia berdasarkan September 2022 yaitu sebesar 9,57%, garis kemiskinannya pada September 2022 tercatat sebesar Rp.535.547,00/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.397.125,00 (74,15%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.138.422,00 (25,85%).³ Badan Pusat Statistika mengklaim bahwasannya kenaikan garis kemiskinan pada September 2022 menjadi yang tertinggi dari 9 tahun terakhir.

Menurut BPS, berdasarkan pulau kenaikan kemiskinan tertinggi terjadi di Maluku dan di Papua. Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di Sumatra pada September 2022 menjadi 5,76 juta jiwa. Adapun angka kemiskinan

². Lilik Rodhiatun Nadhifa, Nur Huri Mustofa, *Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi*, Vol. 3, No. 1, Islamic Economics and Banking, 2021, hlm. 13

³. Badan Pusat Statistika *Persentase Penduduk Miskin September Naik Menjadi 9,57* *Persen*
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html> diakses pada tanggal 22 Juli 2023

tertinggi tetap berada di pulau Jawa yang jumlahnya mencapai 13,94 juta jiwa. Sedangkan kemiskinan di pulau lainnya bervariasi, mulai dari 1-2 juta jiwa.⁴ Provinsi Aceh yang merupakan bagian provinsi dari pulau Sumatera memiliki persentase penduduk miskin yang dimana mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada September 2022. Di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen (0,19 poin). Sedangkan di perkotaan, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 10,31 persen menjadi 10,35 persen (0,04 poin).⁵

Garis kemiskinan makanan (Rupiah/Kapita/Bulan) di Aceh tahun 2022 berdasarkan garis Kemiskinan Makanan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023 dari Badan Pusat Statistika yaitu :

Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan +Perdesaan	
Maret	September	Maret	September	Maret	September
448528.00	481276.00	434104.00	462138.00	438658.00	468255.00

Adapun Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabkota Di Aceh (Ribu Jiwa) menurut data Badan Pusat Statistika pada Maret 2022 yaitu :

⁴.Humas. *Meningkatkannya Angka Kemiskinan di Indonesia.* <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/meningkatnya-angka-kemiskinan-di-indonesia.html#:~:text=Pada%20September%202022%2C%20garis%20kemiskinan,terjadi%20kenaikan%2010%2C16%25>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023

⁵.Badan Pusat Statistika. *Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh September 2022.* <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html> diakses pada tanggal 22 Juli 2023

NO	WILAYAH	PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)
1	SIMEULUE	17.86
2	ACEH SINGKIL	24.33
3	ACEH SELATAN	30.78
4	ACEH TENGGARA	28.42
5	ACEH TIMUR	62.16
6	ACEH TENGAH	31.50
7	ACEH BARAT	38.46
8	ACEH BESAR	58.18
9	PIDIE	85.87
10	BIREUEN	60.29
11	ACEH UTARA	107.02
12	ACEH BARAT DAYA	24.00
13	GAYO LUES	18.09
14	ACEH TAMIANG	38.25
15	NAGAN RAYA	29.63
16	ACEH JAYA	12.13
17	BENER MERIAH	27.93
18	PIDIE JAYA	30.41
19	BANDA ACEH	19.90
20	SABANG	5.14
21	LANGSA	19.41
22	LHOKSEUMAWE	23.03
23	SUBULUSSALAM	14.06

Dari salah satu kabupaten yang ada di Aceh yaitu Aceh timur memiliki indicator kemiskinan dari 2019-2021 menurut data Badan Pusat statistika yaitu sebagai berikut

Indicator kemiskinan	Indicator kemiskinan		
	2019	2020	2021
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	417715,00		
Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	62,79	62,34	63,69
Persentase Penduduk Miskin	14,47	14,08	14,45
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,89	2,29	2,31
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,40	0,61	0,54

Kabupaten Aceh Timur memiliki 24 Kecamatan dengan luas wilayah 6.040,60 Km², dengan jumlah mukim 59 dan 513 Gampong. Adapun kecamatan yang ada di Aceh Timur yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Julok, Kecamatan Nurussalam, Kecamatan Darul Aman, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Serbajadi, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, Kecamatan Indra Makmur, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peudawa, Kecamatan Peurelax Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Darul Ihsan, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Idi Timur dan Kecamatan Darul Falah.⁶

⁶.JDIH Kabupaten Aceh Timur. Gambaran Umum Daerah <https://jdih.acehtimurkab.go.id/news/page/gambaran-umum-daerah#:~:text=Kabupaten%20Aceh%20Timur%20memiliki%20luas,59%20Mukim%20dan%20513%20Gampong>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil 1 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Aceh Timur yaitu kecamatan Serbajadi. Karena Serbajadi merupakan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terpencil), Meskipun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, Aceh tidak termasuk Provinsi 3T, akan tetapi peningkatan infrastruktur akan terus ditingkatkan untuk daerah dalam kategori 3T seperti Aceh Besar di Pulo Aceh, Aceh Barat, Gayo Lues, Simeulu, Pidi Jaya Kawasan Bandar Baru, Aceh Singkil di Pulau Banyak, Aceh Selatan dan Aceh Timur di Sungai Jernih dan Lokop Serbajadi.⁷

Dalam program penanggulangan kemiskinan pemerintah memberikan berbagai macam bantuan sosial yang dimana salah satunya itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Sasaran akses PKH rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial,

⁷. M Ifdhal. *Pj Gubernur Ajak ANTARA Saling Kolaborasi Bangun Daerah 3T* <https://aceh.antaranews.com/berita/337011/pj-gubernur-ajak-antara-saling-kolaborasi-bangun-daerah-3t> di akses pada tanggal 23 Juli 2023

terdiri dari wilayah; pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal terpencil atau perbatasan antar negara.⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial” bahwasanya Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. Penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. PKH sebagai program perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Adapun perlindungan sosial ini dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 25 menjelaskan bahwasannya tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yaitu menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga/seseorang miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko

⁸. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, BAB I “Ketentuan Umum” Pasal 4

sosial. Sedangkan bansos PKH merupakan program pemberian bansos bersyarat kepada seseorang/keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program, penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, dan bantuan yang diberikan berupa uang. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin yaitu pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha dan pelayanan sosial.⁹ Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial.

Program keluarga harapan memiliki dua fungsi yaitu untuk jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM/KSM dan jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga

⁹. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Bagian keempat paragraf 1-7, pasal 12-18

dapat berpengaruh terhadap satu penanggulangan kemiskinan di Indonesia.¹⁰ Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin rentan.¹¹

Pada Agustus 2021 ada sebanyak 450 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima pembagian kartu Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (BanSos PKH). Koordinator PKH kecamatan serbajadi yaitu Syamratul Achwan mengatakan pada saat pembagian kartu tersebut berjalan lancar dan berharap pada saat pencairan uang secara administrasi tidak memberatkan warga, sehingga bansos ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi.¹²

Dalam setahun itu ada empat tahap pembagian yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH, yaitu;

- | | |
|-----------|---------------------|
| Tahap I | : Januari-Maret |
| Tahap II | : April-Juni |
| Tahap III | : Juli-September |
| Tahap IV | : Oktober- Desember |

¹⁰. Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan(PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Tesis 2016, hlm. 12.

¹¹. Takaredase, Julianty Thesa “*Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng*”, Jurnal Eksekutif 3.3 (2019, hlm.5

¹². Akhyar, *450 Keluarga Program PKH di Aceh Timur Terima Kartu Bansos*, Agustus 2021. Dari situs: <https://dialeksis.com/aceh/450-keluarga-program-pkh-di-aceh-timur-terima-kartu-bansos/> diakses 25 September 2022

Di kecamatan Serbajadi ada sebanyak 456 Kartu Keluarga yang mendapatkan bansos PKH tahap 3 tahun 2022 dan setiap kartunya mendapatkan nominal yang berbeda-beda, dimulai dari nominal terkecil sebesar Rp.225.000,00 sampai dengan yang terbesar Rp.2.000.000,00.¹³ Sampai saat ini bantuan sosial PKH masih tetap dilanjutkan, didasarkan pada Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat masyarakat yang sejahtera adil dan makmur”.

Bertambahnya jumlah penerima PKH di Serbajadi disebabkan karena adanya penambahan kouta dari Kementerian Sosial di seluruh Indonesia sebanyak 1 juta penerima yang diberikan secara acak. Adapun di Aceh timur mendapatkan kouta tambahan sebesar 871 KPM PKH yang dimana di Aceh Timur terdapat 23 Kecamatan dan salah satunya adalah Serbajadi yang menerima 6 Kouta tambahan untuk KPM PKH. Meskipun adanya penambahan kouta untuk sifat dari penerima PKH ini dia adalah permanen dimana tidak adanya perpindahan penerima, yaitu meskipun sudah beberapa tahun kedepan tidak adanya penambahan kouta penerima PKH maka jumlah PKH tahun terakhir tetap sama tidak ada pengurangan dikarenakan jumlah penerima PKH yang permanen.¹⁴

Sebagai program penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh Pemerintah, saya ingin melihat apakah PKH ini berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kecamatan Serbajadi.

¹³. Rekapitulasi Data PKH Serbajadi tahap 3 Tahun 2022, diakses dari koordinator Lapangan Kecamatan PKH

¹⁴. Hasil wawancara dengan Syamratul Achwan sebagai Koordinator Kecamatan Serbajadi, pada tanggal 20 Juni 2023

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program penanggulangan kemiskinan di kecamatan Serbajadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program penanggulangan kemiskinan di kecamatan Serbajadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Dengan adanya penelitian yang dilakukan semoga dapat memperkaya ilmu bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Serbajadi sebagai penanggulangan kemiskinan
 - 2) Agar bisa menjadi ilmu bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh yang ada dari diberikannya bantuan sosial dalam bentuk PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia
2. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai pengalaman bagi masyarakat tentang bagaimana dampak maupun pengaruh yang didapat dari adanya bantuan PKH yang disediakan oleh pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu terhadap penelitian saya adalah merujuk kepada beberapa sumber baik artikel, jurnal serta skripsi.

1. Sumber pertama yaitu Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan oleh Julianty Thesa yang berjudul “Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng”. Hasil penelitian yang didapat adalah tingkat kemiskinan di Kampung Manumpitaeng perlahan mulai menurun setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan segala bentuk program pemerintah berjalan secara maksimal termasuk Program Keluarga Harapan. PKH yang dilaksanakan di kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang sudah berjalan dengan baik, dan hasil dari wawancara dengan para responden juga memberikan jawaban yang positif terkait dengan pelaksanaan PKH. Meskipun respondennya menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi pendataan masih kurang baik dikarenakan belum dilaksanakannya pendataan kembali.
2. Sumber kedua dari Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Volume 3 Nomor 1, April 2018 oleh Wimmy Halim yang berjudul “Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang”. Hasil penelitiannya adalah

PKH merupakan program top-down yang rentan digunakan penguasa untuk kepentingan-kepentingan tertentu, semisal untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas elit politik dalam mendekati momen pilkada gubernur Jawa Timur. Kota dan Kabupaten Malang adalah salah satu contoh bahwa PKH digunakan oleh elit politik guna untuk pilkada gubernur 2018. Hal tersebut terjadi karena mereka mengetahui bahwa PKH adalah program dengan orientasi bantuan langsung tunai yang hanya berorientasi menanggulangi kemiskinan secara instan, tidak sampai dengan akarnya. Politisasi PKH menggunakan teori pertukaran sosial akan memahami bagaimana secara tidak langsung para penerima PKH akan terikat secara emosional dan politik, karena PKH dinilai membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Orientasi pemberdayaan memiliki kecenderungan capaian (*goal*) jangka panjang dan membentuk masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dampaknya, PKH akan menjadi salah satu program jangka panjang yang tidak terlalu diminati oleh elit oligarki dengan ketertarikan terhadap program-program kemiskinan jangka pendek ataupun instan, namun memiliki dampak peningkatan signifikan terhadap tingkat elektabilitas dan popularitasnya.

3. Sumber ketiga yaitu Jurnal Dinamika Pemerintahan, Volume 1 Nomor 1, September 2022 oleh Reza Darmiyanti yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020”. Hasil penelitiannya yaitu secara keseluruhan Implementasi PKH dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada 3 indikator yaitu elemen Program, elemen organisasi

pelaksana dan elemen kelompok sasaran. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aspek program sudah terpenuhi seperti adanya tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya serta adanya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program, sementara itu dari segi pelaksana yang jelas dan terstruktur dari kabupaten hingga ke daerah-daerah KPM serta UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) memiliki strategi tersendiri untuk membantu perekonomian para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk bisa keluar dari garis kemiskinan, kemudian pada aspek kelompok sasaran sudah sangat jelas dimana didalam PKH kelompok sasaran didapatkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diproses langsung oleh Kementerian Sosial.

4. Sumber keempat yaitu dari Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, Januari 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sangaperbangsa Karawang, yang ditulis oleh Ratna Sugiyana dkk yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Rengasdengklok” hasil penelitiannya adalah PKH ini masih belum berjalan dengan efektif. Karena program ini hanya berhasil membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengurangi beban pengeluaran saja dan merubah pola pikir KPM dengan kewajiban yang harus dijalankan tersebut tetapi tidak membantu banyak dalam peningkatan ekonomi. Jika komponen sudah habis maka bantuan tersebut akan dihentikan walaupun keluarga tersebut belum sejahtera. Kebanyakan KPM yang melakukan graduasi

mandiri itu adalah yang sudah habis komponennya bukan karena kesejahteraan jadi belum berhasil dalam penanggulangan kemiskinan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kemiskinan

Kotze menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.¹⁵

Kemiskinan menurut konsep perpektif orang miskin adalah suatu kondisi/keadaan yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dimaknai sebagai suatu ketiadaan pekerjaan/keterbatasan peluang kerja, ketidakpastian penghasilan, keterbatasan keahlian, keterbatasan asset/modal serta keterbatasan dalam mengakses pelayanan penting seperti pendidikan,

¹⁵. Hikmat, 2004 dalam Kadji, Yulianto. "*Kemiskinan dan Konsep teoritisnya*." Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG (2012): 1-7, hlm. 1

kesehatan, transportasi umum, sanitasi yang sehat seperti air bersih dan lingkungan yang sehat, serta fasilitas kredit untuk pengembangan usaha.¹⁶

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multi dimensional), artinya dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologi. Secara politik kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.¹⁷ Kemiskinan juga telah berkembang dalam hal konsep, definisi dan interpretasi. Kemiskinan pertama yaitu mengacu pada konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, yang kemudian konsep ini berkembang menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.¹⁸

Konsep kemiskinan telah mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya lagi dianggap sebagai dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Ada beberapa definisi yang menggambarkan konsisi ketiadaan tersebut, salah satunya yaitu definisi kemiskinan yang digunakan oleh BPS, yang menjelaskan

¹⁶. Hermawati, Istiana. "Pengukuran konstrak kemiskinan di Indonesia." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41.3 (2017): 269-284, hlm. 274.

¹⁷. Huraerah, Abu. "Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12.1 (2013): 3-13, hlm. 3-4.

¹⁸. Noorikhshan, Faisal Fadilla, and Hendra Gunawan. "Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik". *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4.2 (2022): 133-154, hlm. 140.

kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.¹⁹

Batas kemiskinan menurut Biro Pusat Statistika ditunjukkan oleh pendapatan Rp.27.905/kapita/hari untuk perkotaan dan Rp.18.244/kapita/hari untuk pedesaan. Disisi lain Djyohadikusumo menggunakan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan US\$50/kapita/tahun untuk pedesaan dan US\$75/kapita/tahun untuk perkotaan. Sedangkan Bank Dunia untuk standar internasional memberikan batas garis kemiskinan yang lebih tinggi dari standar-standar lainnya yaitu dengan pendapatan sebesar US\$275/kapita/tahun.²⁰

Bagi Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi masalah yang serius. Meskipun secara statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2006. Namun secara absolut jumlah penduduk miskin di Indonesia masih saja sangat besar. Kemudian pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia mencapai 38,74 juta jiwa. Jumlah ini terus menurun hingga pada tahun 2006 penduduk miskin yang ada di Indonesia naik menjadi 39,3 juta.²¹

¹⁹.Takaredase, Julianty Thesa “Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng”, hlm.3

²⁰. Sudirman, Senthot, et al. "*Analisis Determinan Dan Program Pengentasan Kemiskinan Rumahtangga Petani Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mengatasi Kemiskinan Petani (Studi Di Desa Bogem Kecamatan Bayat, Klaten Jawa Tengah)*." (2011).Hlm. 24-25

²¹. Ishatono, Ishatono and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan". Share: Social Work Jurnal 6.2 (2016): 159, hlm.161

Dimensi sosial-politik dari kemiskinan berfokus pada derajat akses terhadap suatu kekuasaan. Termasuk didalamnya tatanan sistem sosial politik, yang dapat menentukan alokasi sumber daya yang berpihak pada kelompok orang atau tatanan sistem sosial. Kemudian politik melihat kemiskinan ini sebagai sebuah gejala yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan kreativitas manusia dan sosial dan pada kualitas manusia. Kebijakan pemerintah sendiri dalam kerangka sosial-politik mungkin sengaja maupun tidak disengaja, beberapa diantaranya mengarah pada kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pandangan para ahli teori politik bahwasannya kebijakan pemerintah yang buruk adalah penyebabnya, bukan masyarakat miskin dan negara menjadi miskin (*poor making countries poor*).²²

Brady dalam Teori politik berpendapat bahwa kemiskinan merupakan sebuah hasil politik yang disebabkan oleh sebuah hubungan kekuasaan dan pilihan kolektif terhadap bagaimana mendistribusikan sumber daya.²³

2.2.2 Kemiskinan Kultural

(KBBI) kultural adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. Menurut Elizabeth Taylor dan L.H. Morgan kultur adalah sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam

²². Noorikhshan, Faisal Fadilla, and Hendra Gunawan. "Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik", hlm. 143

²³. Drs. Sudarmo, MA., Ph.D " Kemiskinan dari Segi Politik" Mata Kuliah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, 2021, Univesitas Sebelas Maret, Surakarta

tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat.²⁴ Secara garis besar kultur adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang dan cara hidup tersebut diwariskan terus menerus dari generasi ke generasi, akan tetapi budaya tersebut tidak turun temurun, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Menurut Sunyoto Usman perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga level analisis yaitu, individual, keluarga dan masyarakat. Pada level individual ditandai dengan sifat yang lazim disebut dengan *a strong feeling of marginality* seperti sikap parochial, apatisme, atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada level keluarga ditandai oleh jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union consensual marriage*. Kemudian yang terakhir yaitu pada level masyarakat terutama ditandai oleh tidak terintegrasi secara efektif dengan institusi-institusi masyarakat. Mereka kemudian seringkali dianggap sebagai sebuah objek yang perlu digarap dari pada sebagai subjek yang perlu diberi peluang berkembang.²⁵

Kemiskinan kultural juga terjadi karena faktor internal dari orang tersebut, seperti etos kerjanya yang rendah, mudah menyerah, malas belajar dan masih banyak lagi. Kelompok miskin kultural tidak mampu

²⁴. Dhian Afrida Muthia “*Studi Pemikiran H.A.R. Tilaar terhadap Nilai-Nilai Plurikulturalisme dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*” (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

²⁵. Ignes, Novirensi “*Hambatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah tangga miskin di Ngari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)*” Diploma thesis, Universitas Andalas, 2016, hlm. 14

memanfaatkan sumber daya yang ada karena mereka cenderung tidak memiliki keinginan untuk memanfaatkannya. Kemiskinan kultural ini biasanya terdapat pada mereka yang berasal dari strata sosial paling rendah, sedang mengalami perubahan pesat dan yang telah terasing dari masyarakat tersebut.²⁶

Jadi kemiskinan kultural ialah kemiskinan yang dilihat dari budaya maupun cara hidup seseorang atau sekelompok orang, penyebab kemiskinan ini terjadi karena faktor internalnya sendiri dimana budaya masyarakat tersebut ialah memiliki ketergantungan terhadap sesuatu dan hidup dalam kepasrahan akan kehidupannya.

2.2.3 Kemiskinan Struktural

Struktural dalam KBBI adalah berkenaan dengan struktur. Struktur juga dapat diartikan sebagai susunan atau cara sesuatu yang disusun atau dibangun. Makna struktural sendiri berarti makna yang berbentuk karena penggunaan kata dan kaitannya dengan tata bahasa. Soejatmoko dalam Syahrizal menjelaskan kemiskinan struktural merupakan golongan miskin yang terpenjarakan oleh struktur-struktur sosial eksploitatif yang melanggengkan ketergantungan dan kelumpuhannya. Soejatmoko mencontohkan dua golongan masyarakat yang termasuk atau terjebak dalam kemiskinan struktural yaitu buruh nelayan dan pengrajin di kota-

²⁶. Arifin, Johan. "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 6.2 (2020): 114-132, hlm. 123

kota kecil.²⁷ Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial-politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.²⁸

Dari berbagai pengertian tentang kemiskinan struktural diatas dapat kita pahami bahwasannya kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat bukan karena keinginannya sendiri, akan tetapi karena kurangnya sumber daya serta keadaan miskin tersebut datang dari struktur kepemilikan tanah dan struktur sosial masyarakat, atau juga dapat dikatakan bahwa faktor kemiskinan struktural itu sendiri berasal dari eksternal masyarakat miskin.

2.2.4 Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal satu ayat 1 mendefinisikan Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

²⁷. Igenes, Novirensi (2016) “*Hambatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah tangga miskin di Ngari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)*”, hlm. 12

²⁸. Ela Olanda dkk, “ Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Kemiskinan di Desa Mekar sama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna”, *Neo societal*, Vol. 4 No. 1, Januari 2019 (584-590) , hlm. 587

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Upaya nasional ini menunjukkan bahwa masih kemiskinan sendiri masih menjadi masalah yang serius.²⁹

Dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 5 menjelaskan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari :

- 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

²⁹. Ishatono, Ishatono and Santoso Tri Raharjo. "Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan". hlm. 160

Dalam praktik pengentasan kemiskinan pendekatan politik dan pilihan kebijakan berpengaruh pada hasil pengentasan kemiskinan yang berbeda-beda berdasarkan situasi aktual. Untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi kemiskinan setiap Negara di bawah kendali institusi-institusi politiknya mengadopsi kebijakan yang tepat, seperti adanya prioritas yang diberikan kepada sektor pedesaan, transfer pendapatan, upah minimum, reformasi administrasi, dan kebijakan preferensi kelompok khusus.³⁰

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, paradigma Neo-Liberal dimana pada paradigm ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Bagi pendekatan ini pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapus kemiskinan. Paradigm Neo-liberal ini telah digerakkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan.

Kedua, Paradigma Demokrasi-Sosial melihat kemiskinan sebagai persolan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatkah yang

³⁰. Noorikhsan, Faisal Fadilla, and Hendra Gunawan. "*Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik*", hlm. 140

mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, akan tetapi tidak memandangnya sebagai sistem kapitalis yang harus dihapuskan, karena dinilai masih menjadi bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif.³¹

Kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki domain pada urusan bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu warga. Di Indonesia sendiri kebijakan penanggulangan kemiskinan masih diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkup dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan Nasional.³²

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwasannya setiap dekade strategi penanggulangan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan Kesehatan dan Pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. Bank Dunia kemudian menilai strategi penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah di Indonesia harus diperluas fokusnya agar mencakup juga rumah tangga miskin dan tidak begitu miskin. Indonesia yang merupakan negara dengan penghasilan menengah ke bawah sejatinya menggunakan standar paritas daya beli US\$ 3,2/ kapita/hari.

³¹. Enny Febriana, "*Strategi untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani miskin di perdesaan: studi kasus pada rumah tangga petani miskin di desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi*" Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010, hlm. 15-16

³². Fachrudin, Reza. "*Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah kota balikpapan.*" JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 4.2 (2015), hlm. 328

Bank dunia kemudian mengungkapkan ada tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan yaitu:

1. Memberikan bantuan sosial dan subsidi
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Infrastrktur pelayanan dasar.³³

Gunnar Adler Karlsson mengemukakan strategi penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

1. Strategi jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusinya.
2. Strategi jangka Panjang yaitu dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka Panjang ini dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.³⁴

³³. Arrijal Rachman dan Aulia MH, 2023, *Bank Dunia Bagikan 3 Solusi Atasi Kemiskinan Untuk Jokowi*, CNCB Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512135556-4-436891/bank-dunia-bagikan-3-solusi-atasi-kemiskinan-untuk-jokowi/amp> diakses pada tanggal 23 Juli 2023

³⁴. Tritimo Yulianto, “Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, dari situs [https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html#:~:text=Strategi%20tersebut%20selanjutnya%20dituangkan%20dalam,dan%203\)%20pengembangan%20budaya%20usaha](https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html#:~:text=Strategi%20tersebut%20selanjutnya%20dituangkan%20dalam,dan%203)%20pengembangan%20budaya%20usaha) diakses pada tanggal 23 Juli 2023

2.2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program dimana pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Perlindungan Sosial yang didalamnya termasuk PKH juga dikenal sebagai istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)*³⁵ di dunia internasional, program ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh Negara-negara dengan angka kemiskinan tinggi.

Sebagai sebuah program sosial bersyarat, PKH memberikan akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang disediakan di sekitar masyarakat tersebut. Manfaat PKH juga mulai didukung untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita presiden RI.³⁶

Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung) sekaligus meningkatkan investasi pada generasi mendatang dengan meningkatkan kesehatan anak dan kualitas pendidikan.

³⁵. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, "*Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*", 2021, Hlm. 7

³⁶. Intan Putri Pratiwi, dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting*, Vol. 8, No. 2, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Ilmu Komputer, 2019, hlm. 184.

Dalam jangka panjang, Program Keluarga Harapan (PKH) berjanji akan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.³⁷

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II menyatakan Program PKH sebagai program penanggulangan kemiskinan klaster I dan menjelaskan bahwa Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Lima Komponen Tujuan MDG's yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; pendidikan dasar; kesetaraan gender; pengurangan angka kematian bayi dan balita; pengurangan kematian ibu melahirkan. Sumber pendanaan PKH berasal dari; anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kota/kabupaten serta sumber dana yang lain yang sah dan tidak mengikat³⁸.

b. Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun kriteria dan syarat-syarat untuk mendapatkan program bantuan pemerintah tersebut, kriteria penerima program bantuan PKH :

1. Ibu hamil sebesar Rp 3.000.000/ Tahun
2. Anak usia dini sebesar Rp 3.000.000/ Tahun
3. Anak usia sekolah Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 900.000/ Tahun

³⁷. Kahfi Septian Mawarni, *Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciomas Kecamatan Panajalu Kabupaten Ciamis*, hlm. 56.

³⁸. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, BAB VI "Pendanaan" Pasal 57

4. Anak usia Sekolah Menengah pertama (SMP) sebesar Rp 1.500.000/ Tahun
5. Anak usia sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp 2.000.000/ Tahun
6. Lanjut usia atau lansia sebesar Rp 2.400.000/ Tahun
7. Penyandang disabilitas sebesar Rp 2.400.000/ Tahun

Kemudian, Kemensos juga menetapkan syarat untuk mendapatkan bansos PKH yaitu:

1. Ibu hamil maksimal kehamilan kedua (tidak lebih),
2. Anak usia dini maksimal dua anak dalam satu keluarga,
3. Anak usia sekolah SD maksimal satu anak dalam satu keluarga.
4. Anak usia sekolah SMP maksimal satu anak dalam satu keluarga,
5. Anak usia sekolah SMA maksimal satu anak dalam satu keluarga,
6. Lanjut usia atau lansia maksimal satu orang dalam keluarga, dan
7. Penyandang disabilitas maksimal satu orang dalam keluarga.

Kriteria penerima PKH ini diberikan untuk memilih masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, dengan adanya kriteria yang diberikan oleh pemerintah maka hal tersebut juga dapat mempermudah petugas PKH untuk menentukan siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan program bantuan PKH. Kriteria ini juga diberikan sesuai dengan tujuan dari program bantuan PKH sendiri yaitu agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta untuk para penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dengan adanya fasilitas tersebut

pemerintah berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kesehatan anak serta taraf pendidikan yang ada di Indonesia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dari sebuah fenomena sosial yang berdasarkan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengalaman mendapatkan data di lapangan kemudian melahirkan pemahaman, pertanyaan, dan hipotesis yang memandu peneliti untuk memusatkan perhatiannya pada isu tertentu. Pertanyaan penelitian dipertajam setelah peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.³⁹

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti; mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.⁴⁰ Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami arti secara mendalam yang berkaitan dengan fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik kehidupan sosial.

³⁹. Jaya, I. Made Laut Mertha, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia, 2020, h. 123

⁴⁰. Nugrahani, Farida, and M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books 1.1, 2014, hlm. 25.

Jenis penelitian ini menekankan catatan dengan deskripsi seperti kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna untuk mendukung penyajian datanya. Oleh karena itu penelitian kualitatif secara umum juga sering disebut sebagai pendekatan kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat dan dikumpulkan.⁴¹

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga disebut sebagai pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Sejumlah masalah yang diidentifikasi, dikaji dan dipertimbangkan apakah perlu diteliti atau tidak. Dengan menetapkan fokus masalah maka peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian.⁴² Fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana dampak serta pengaruh keberadaan PKH di Kecamatan Serbajadi sebagai program penanggulangan kemiskinan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang akan diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada banyak pertimbangan seperti kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang direncanakan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kabupaten Aceh Timur yaitu bertepatan di Kecamatan Serbajadi.

⁴¹. Farida Nugrahani and M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 96.

⁴². Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, 2022, hlm. 109.

3.4 Jenis dan Sumber

Beragam sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata hingga yang samar-samar, mulai dari yang primer hingga sekunder. Oleh sebab itu, dalam memilih sumber data peneliti haruslah benar-benar berpikir mengenai kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga berkaitan dengan validitasnya. Adapun sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu, dokumen atau arsip, narasumber yaitu informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda dan gambar serta rekaman.⁴³

Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh melalui data utama yakni diperoleh secara langsung di lapangan seperti narasumber atau informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan melainkan diperoleh dari buku, dokumen, foto dan statistika. Sumber data sekunder dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap bila di data utama tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data primer.⁴⁴

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang penting dalam penelitian. Menurut Sugiyono terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil

⁴³. Farida Nugrahani and M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2014, hlm. 109.

⁴⁴. Farida Nugrahani and M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 113 .

penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.⁴⁵

Pengumpulan data itu kemudian dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah proses maupun interaksi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara juga merupakan kegiatan untuk memperoleh sebuah informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.⁴⁶ Adapun narasumber yang akan dijadikan untuk informan dalam penelitian ini yaitu :

No	Status Informan	Jumlah Informan
1	Kepala Desa	2
2	Koordinator PKH Kecamatan	1
3	Penerima PKH	2
4	Bukan Penerima PKH	1
5	Petugas yang Membagi Uang PKH	1
6	Sekretaris Camat Serbajadi	1

⁴⁵. Pradikta, Eka Prasetya, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*, Publika 1.3 (2013), hlm. 7.

⁴⁶. Rahardjo, Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011, hlm. 2.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian ataupun pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan Koran dan bahan referensi lain yang dapat dijadikan dokumentasi oleh peneliti. Berbagai dokumen atau arsip yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, untuk melengkapi data-data yang didapat dari wawancara dengan para informan dan observasi tentang tempat maupun aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang didapat bisa jadi berasal dari informan peneliti, pejabat pemerintah maupun sumber lainnya.⁴⁷



⁴⁷. Farida Nugrahani and M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 63

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Potret Kecamatan Serbajadi

4.1.1. Sejarah Kecamatan Serbajadi

Menurut sejarahnya, pada tahun 1990 Kecamatan Serbajadi merupakan wilayah administrasi dari Kabupaten Aceh Tengah, namun karena rentang waktu kendali yang sangat jauh, kemudian daerah ini diserahkan ke Kabupaten Aceh Timur. Dengan alasan agar masyarakat lebih mudah untuk mengurus segala kebutuhan administrasi dan kependudukan.

Saat ini Ibu Kota Kecamatan Serbajadi adalah Lokop, banyak orang menyebutkan makna Lokop adalah magga hutan, karena Ketika daerah ini dibuka terdapat banyak pohon manga yang tumbuh karena tanahnya subur. Akan tetapi, ada juga Sebagian yang menyebutkan bahwa Serbajadi berasal dari *Serbe* dan *Jadilah*. *Serbe* memiliki arti manga hutan. Dahulunya Ketika ada seseorang yang memakan buah manga dan orang lainnya bertanya bagaimana rasanya? Maka orang tersebut mengatakan *jadilah* yang bermakna bolehlah.

Hurgronje menyatakan pada masa lalu daerah Serbajadi tidak begitu terkenal. Daerah Serbajadi dibangun oleh dua merah, yaitu Merah Jernang

dan Merah Abok. Pada mulanya Serbajadi hanya terdiri dari dua kelompok yaitu bunin dan Lokop.⁴⁸

4.1.2. Letak Geografis

Kecamatan Serbajadi adalah kecamatan yang berdiri sekitar tahun 1948 setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.⁴⁹ Kecamatan Serbajadi merupakan satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Serbajadi memiliki 17 Desa/Gampong diantaranya yaitu ; Arul Durin, Bunin, Jering, Leles, Lokop, Loot, Mesir, Nalon, Rampah, Sekualan, Sembuang, Seuleumak, Sunti, Terujak, Tualang, Ujung Karang dan Umah Taring. Dengan jumlah 3 kemukiman yaitu tualang, jering dan bunin.

Kecamatan Serbajadi memiliki luas wilayah 2.165,66 Km², dengan suhu rata-rata berkisaran antara 25°-29° C dengan ketinggian 500-700 dari permukaan laut. Dari segi letaknya, Kecamatan Serbajadi bisa dikatakan sebagai kecamatan yang memiliki letak strategis dan berjarak +_ 110 KM ke Ibukota Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Serbajadi ditinjau dari batas wilayah terletak pada:

⁴⁸. Agung Suryo Setyantoro, dkk. "*Bunin: Gampong Budaya di Aceh Timur*", Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh, (2022), hlm. 11-19

⁴⁹. Suheri, Ery. "*Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011, hlm. 4

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Peunaron dan Pante Bidari
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Takengon dan Bener Meriah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih

Karena adanya keterbatasan infrastuktur, Kecamatan Serbajadi terasa sangat jauh dari wilayah tetangganya yaitu wilayah Gayo serta pusat kota Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu, wilayah ini dikategorikan sebagai wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terpencil).

4.1.3. Demografi

Demografi (keadaan penduduk) Kecamatan Serbajadi berdasarkan pada data profil Kecamatan Serbajadi dalam angka (2022) berjumlah 7592 Jiwa, jumlah kartu keluarga sebanyak 2169 dan keluarga miskin berjumlah 645 KK adapun pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan Serbajadi memiliki 7592 jiwa dari 2169 kartu keluarga yang ada berdasarkan data tahun 2022 adapun klasifikasi menurut jenis kelaminnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk Kecamatan Serbajadi menurut Jenis
Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3818 Jiwa
2	Perempuan	3774 Jiwa
	Total	7592 Jiwa

Sumber data : Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2022

**Jumlah Penduduk Kecamatan Serbajadi Menurut
Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	394	409	803
5-9	441	424	865
10-14	490	375	865
15-19	348	313	661
20-24	251	384	635
25-29	240	313	553
30-34	276	330	606
35-39	223	229	452
40-44	222	257	479
45-49	189	178	367
50-54	146	90	236
55-59	92	86	178
60-64	48	79	127
65-69	40	32	72
70-74	26	17	43
75+	22	13	35
Jumlah	3 448	3 529	6 977

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur (diolah)

Gambar 4.1 Sumber data : Kecamatan Serbajadi dalam
Angka 2022

2. Keadaan Suku dan Agama

a. Suku

Ada beberapa suku yang kemudian hadir di Kecamatan Serbajadi yakni suku Aceh Gayo dan Jawa. Akan tetapi mayoritas yang banyak tinggal di Kecamatan Serbajadi adalah suku gayo. Adapun suku yang paling lama menetap di Serbajadi adalah Sebagian besar etnis suku gayo dan suku jawa. Suku gayo ini kemudian berasal dari beberapa daerah yang ada di Aceh yaitu Gayo Lues, Aceh Tenggara, Takengon dan Bener meriah.

b. Agama

Dulunya masyarakat Serbajadi 100% menganut agama Islam, karena agama tersebut merupakan agama nenek moyang masyarakat Serbajadi, meskipun demikian seiring berjalannya waktu banyak para pendatang yang kemudian menetap di Kecamatan Serbajadi, baik itu karena profesi ataupun hal lainnya yang membuat mereka menetap di Kecamatan Serbajadi.

Para pendatang inilah yang kemudian sebagian Non-Muslim, meskipun tidak banyak ada lebih dari 3 orang yang Non-muslim tinggal di Kecamatan Serbajadi. Oleh karena itu saat ini tidak bisa dikatakan lagi bahwa di Serbajadi 100% menganut agama Islam. Karena bagaimanapun para pendatang yang menetap tersebut tetaplah bagian dari masyarakat Kecamatan Serbajadi.

3. Keadaan Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan

a. Pendidikan

Keadaan Pendidikan di Kecamatan Serbajadi meningkat seiringnya berjalan waktu, fasilitas Pendidikan juga sudah memadai dan juga banyak dari masyarakat yang kemudian sadar akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan motivasi Pendidikan anak bagi masyarakat yang ada di Serbajadi dibangun fasilitas Pendidikan, yaitu :

Table 4.2
Fasilitas Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	PAUD	1
3	SD	9
4	SMP	2
5	SMK	1
6	TPA/TPQ	27

Sumber data : Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2022

Keadaan ataupun jumlah serta didik yang ada di Kecamatan Serbajadi adalah sebagai berikut :

Table 4.3**Jumlah Siswa Didik**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	150 Siswa
2	SD	1135 Siswa
3	SMP	642 Siswa
4	SMK/SMA	200 Siswa

Sumber data : Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2022

b. Ekonomi

Ada berbagai mata pencaharian yang ada di Kecamatan Serbajadi, diklasifikasikan sebagai berikut:

Table 4.4**Pekerjaan Penduduk Kecamatan Serbajadi**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Guru	212 Jiwa
2	Pedagang	149 Jiwa
3	PNS (kantor Camat)	21 Jiwa
4	Dokter	1 Jiwa
5	Mantri/ Perawat	18 Jiwa
6	Bidan	20 Jiwa
7	Dukun Bersalin	24 iwa

Sumber data : Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2022

Untuk jumlah PNS sebenarnya lebih dari 21 orang, akan tetapi klasifikasi tersebut dimasukkan ke dalam guru, karena kebanyakan PNS yang ada di Serbajadi berprofesi sebagai guru. Selebihnya masyarakat yang ada di Serbajadi adalah sebagai petani, baik itu petani Sawit, pohon Karet, Cabe dan sebagainya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Serbajadi merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang dimana banyak masyarakat bergantung kepada hasil dari pertaniannya serta usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan pertanian. Dalam sistem mata pencaharian Bertani ini hampir seluruh keluarga melaksanakan kegiatan pertanian tersebut, mulai dari para orang tua serta anak-anaknya.

c. Kesehatan

Ada beberapa kriteria Kesehatan yang ada di Kecamatan Serbajadi, baik dari segi angka kelahiran, angka kematian dan penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat serta jumlah stunting. Adapun kualifikasinya adalah sebagai berikut:

Table 4.5**Jumlah Angka Kelahiran dan Kematian**

Jenis Kelamin	Kelahiran	Kematian
Perempuan	42	12
Laki-laki	49	16
Jumlah	91	28

Sumber data : Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2022

Table 4.6**Jumlah Penyandang Cacat dan Stunting**

Penyandang Cacat	Jumlah	Stunting	Jumlah
Buta	3	Gizi Buruk	4
Tuli	8	Kategori Pendek	133
Bisu	5	Kategori Sangat Pendek	43
Kejiwaan	12		
Idiot	10		
Cacat Fisik	13		
Total	53	Total	180

Sumber data : Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2022

Meskipun dari Kabupaten Aceh Timur dari pengeluaran Kesehatan memiliki angka kenaikan di tahun 2022 yaitu dapat dilihat dari gambar kurva dibawah ini:



Gambar 4.3 Sumber: Susenas Maret Kabupaten Aceh Timur

4.2 Budaya Masyarakat

Budaya adalah semua hasil karya, rasa dan cipta manusia dimana ia merupakan seluruh tatanan cara kehidupan yang lengkap termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat.⁵⁰ Masyarakat Serbajadi memiliki budaya serta adat istiadatnya sendiri, masyarakat Serbajadi mempunyai suatu adat budaya yang memang lebih banyak diikuti dari para pendahulu artinya kebiasaan tersebut telah ada turun-temurun dan masih kental adanya di lingkungan masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Geuchik Desa Nalon, beliau mengatakan

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya desa juga memiliki Qanunnya sendiri, yang didalamnya sudah mengatur adat dan istiadat yang ada di desa. Untuk sebuah masalah yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maka kita menyelesaikannya terlebih dahulu

⁵⁰. Syakhrani, Abdul Wahab, and Muhammad Luthfi Kamil. "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal." *Cross-border* 5.1 (2022): 782-791. Hlm. 782

secara kekeluargaan. Ada juga salah satu budaya yang memang sudah kental di masyarakat kita ini yaitu salah satunya budaya Nangal yang kita lakukan sebelum memasuki musim bersawah. Tidak hanya budaya Nangal yang ada di masyarakat kita ada juga budaya Nirin Reje yang dilakukan pada hari raya kedua Idul Fitri. Budaya ini memiliki maknanya tersendiri yaitu untuk mempererat silaturahmi Geuchik dengan masyarakatnya. Oleh karena itu budaya kita saat ini sangatlah masih kental karena budaya ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita.”⁵¹

Nangal merupakan adat istiadat yang sudah ada dari nenek moyang Kecamatan Serbajadi, dan hal ini masih sering dilakukan oleh masyarakat karena hal tersebut merupakan suatu budaya turun-temurun yang memang tidak pernah ditinggalkan serta masih kental di kalangan masyarakat. Adapun tata cara dalam melakukan Nangal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat yang dihadiri oleh Ketua Mukim, Kejuruan Blang, Geuchik dari setiap desa dan Imam. Rapat ini dilakukan untuk membahas tentang dana yang akan diperlukan dalam proses Nangal, yaitu kerbau, beras dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam proses Nangal.
2. Setelah melakukan rapat maka selanjutnya masyarakat melakukan Khanduri di Makam Tgk Ampun Tuan, yang merupakan makam keramat di Serbajadi
3. Setelah Khanduri selanjutnya setelah selang 2 hari maka kerbau tersebut akan dibawa berkeliling di setiap desa dengan cara serah terima di setiap desa. Untuk kemukiman yang menjadi tuan rumah, desa-desa tersebut kemudian ada dalam 2 pemukiman yang dimana Mukim Jering terdiri dari 6 Desa dan kerbau dari kemukiman ini adalah Kerbau yang warna mirip dengan sapi atau masyarakat menyebutnya dengan “Koro Jeget”, sedangkan

⁵¹. Hasil wawancara dengan Bapak Muhtadi selaku Kepala Desa Nalon, pada tanggal 24 Juni 2023

Mukim Tualang Terdiri dari 5 Desa dan Kerbau dari kemukiman ini adalah Kerbau Jantan biasa.

4. Setelah selesai proses berkeliling dengan kerbau tersebut maka selanjutnya kerbau itu akan disembelih dan dilakukan lagi Khanduri di Desa yang menjadi tuan rumah.
5. Setelah selang 2 hari maka akan dilakukan "*Nene Nyangkul*" atau dalam Bahasa Indonesianya penandaan musim menyangkul bersawah, dalam proses ini akan dilakukan Peusujuk dengan Bahan yaitu 6 batang Tebu, Kelapa Muda, dan Telor. Tebu tersebut kemudian ditanam di sawah yang sudah di cangkul dan kemudian Ketua mukim melihat ditanah mana yang tidak retak pada saat penanaman tebu tersebut. Proses Peusujuk pada Nene Nyangkul ini memiliki arti untuk melihat kesuburan tanah pada musim bersawah.
6. Setelah proses Nene Nyangkul ini selesai, maka kejuruan blang selanjutnya akan mengumumkan bahwasanya untuk musim menyangkul sudah masuk.
7. Setelah semua sawah siap dicangkul kejuruan blang, ketua mukim, imam dan Geuchik dari setiap desa akan melakukan Kembali Peusujuk yang kemudian disebut "*Nene Nomang*" dalam Bahasa Indonesia bearti dimulainya proses penyemaian benih padi.

Itulah semua tata cara proses Nangal yang dilakukan di Kecamatan Serbajadi, sebenarnya ada 3 kemukiman di Serbajadi akan tetapi untuk Mukim Bunin Jaraknya sangat jauh dengan 2 mukim ini sehingga nangalnya dilakukan secara terpisah dengan kemukiman Bunin.

Budaya tersebut masih ada sebab hampir seluruh dari masyarakat yang ada di Serbajadi memiliki sawah untuk dikelola sebagai kebutuhan hidupnya. Karena bersawah di Serbajadi memiliki 2 musim dalam satu tahun dan masyarakat memang banyak yang berprofesi sebagai petani, baik itu petani sawah, kebun dan lain-lain. Masyarakat juga biasanya memiliki berbagai macam cara bersawahnya, sebagai contoh A memiliki lahan persawahan yang luas, akan tetapi ia tidak mau untuk mengerjakan lahan persawahannya tersebut, kemudian ada si B yang ingin bersawah namun lahan yang dimiliki hanya sedikit, jadi kemudian si B meminta untuk mengerjakan lahan tersebut dan hasilnya akan dibagi 3 yaitu 2:1, 2 untuk B dan 1 untuk si A.

Jadi meskipun mereka memiliki lahan, tidak semua lahan tersebut ia kerjakan sendiri, hal ini bisa disebabkan baik dari tidak adanya modal untuk persawahan tersebut maupun memang malas untuk mengerjakan lahan persawahan yang ia miliki. Adat budaya nangal masuk ke dalam tujuh unsur kebudayaan yang dianggap secara *culture universal*, dimana ia merupakan unsur dari budaya religi (kepercayaan) masyarakat terhadap budaya nangal tersebut akan membuat tanah persawahan menjadi subur.

Ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap secara *culture universal* (kebudayaan yang hadir secara menyeluruh), yaitu:

1. Peralatan serta perlengkapan hidup manusia seperti pakaian perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan sebagainya.
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya.

3. Sistem kemasyarakatan yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum dan sistem perkawinan.
4. Bahasa (lisan maupun tertulis).
5. Kesenian, baik itu seni rupa, seni suara seni gerak dan sebagainya.
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).⁵²

Berdasarkan 7 unsur kebudayaan di atas selain budaya religi yang dimiliki oleh masyarakat Serbajadi, mereka juga memiliki budaya mata pencaharian hidup seperti sistem peternakan yang tidak mereka urus sendiri. Kebanyakan untuk budaya mata pencaharian hidup mereka melakukan sistem mawah baik itu dari peternakan maupun lahan pertanian. Mawah merupakan suatu akad Kerjasama yang sering dilakukan di masyarakat Aceh, mawah ini merupakan kerja sama antara pihak pemilik barang dengan orang yang mengerjakan barang mawah tersebut, dengan hasil yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain memiliki budaya mawah, masyarakat juga masih banyak yang bekerja sebagai tukang upah, baik di perkebunan maupun di persawahan.

4.3. Potret Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang sering kita temui disekitaran kita. Pemikiran tentang kemiskinan berubah seiring berjalannya waktu, akan tetapi pada dasarnya kemiskinan ini berkaitan dengan situasi yang serba kekurangan

⁵². Wa Ode Rosliya, "*Perspektif Islam Terhadap Buday Kabuenga Di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*", 2016, Skripsi thesis, IAIN KENDARI. hlm.

yang terjadi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan adanya kekuatan yang dimilikinya. Penyebab terjadinya kemiskinan ini dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial serta kondisi kultral (budaya).⁵³

Kemiskinan juga terjadi di Kecamatan Serbajadi, kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari masyarakat sendiri yang enggan untuk meningkatkan kualitas hidupnya maupun dari segi sosial, ekonomi dan pendapatan. Berbicara tentang kemiskinan yang kemudian terjadi di Kecamatan Serbajadi bukanlah hal yang lumrah untuk didengar, karena wilayah ini termasuk kedalam kategori 3T.

Teori kemiskinan kultural yang dikemukakan oleh Oscar Lewis menyatakan bahwa kemiskinan ini dapat muncul dari dalam diri si miskin (faktor internal), sebagai akibatnya yaitu adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh prang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal yang memang datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, antara lain adalah birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Serbajadi mengatakan bahwa

⁵³. Tritimo Yulianto, "Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", dari situs [https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html#:~:text=Strategi%20tersebut%20selanjutnya%20dituangkan%20dalam,dan%203\)%20pengembangan%20budaya%20usaha](https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html#:~:text=Strategi%20tersebut%20selanjutnya%20dituangkan%20dalam,dan%203)%20pengembangan%20budaya%20usaha) diakses pada tanggal 29 Juni 2023

⁵⁴. Huraerah, Abu. "Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12.1 (2013): 3-13, hlm. 4

“Kemiskinan yang terjadi di Kecamatan kita ini bukan disebabkan karena kurangnya bantuan, akan tetapi masih ada masyarakat yang menginginkan dirinya untuk masuk kedalam kategori keluarga miskin, karena memang terkadang mereka sangat mengharapkan bantuan itu dan hanya itu saja harapan mereka, karena ada juga saya dengar-dengar bahwa Sebagian nominal dari penerima PKH ini memang besar nominalnya.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita katakan bahwasannya masyarakat masih memiliki etos kerja yang rendah serta rasa malasnya untuk berkembang, sebab jika ia ingin mengembangkan dirinya dengan baik tentunya ia tidak akan mendorong dirinya sendiri agar mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah memiliki syarat serta kriterianya sendiri. Berdasarkan data tahun 2022 ada sebanyak 645 kartu keluarga yang masuk kedalam kategori keluarga miskin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat bahwasannya kemiskinan dibagi kedalam 4 kategori yaitu; sangat miskin, miskin, rentan miskin dan tidak miskin.

1. Sangat miskin merupakan keluarga yang memang keadaanya tidak memiliki rumah, makan dalam sehari mungkin sekali atau dua kali dan tidak bergizi serta tidak memiliki harta benda sedikitpun.
2. Miskin merupakan keluarga yang memang memiliki rumah tidak layak huni, tidak adanya kendaraan ataupun transportasi (harta benda yang mencukupi) serta makan dalam sehari memang terkadang dua kali atau tiga kali akan tetapi makanannya tidak bergizi.

⁵⁵. Hasil wawancara dengan bapak Samsuddin selaku Sekretaris Camat, pada tanggal 23 Juni 2023

3. Rentan Miskin merupakan keluarga yang memnag berpenghasilan akan tetapi timbulnya suatu masalah seperti bangkrutnya usaha yang mereka buat.
4. Tidak miskin merupakan keluarga yang berpenghasilan mencukupi seperti para PNS (*Pegawai Negeri Sipil*), dimana keadaan ekonominya stabil yang didapat dari gajinya perbulan.⁵⁶

Masyarakat Serbajadi masih banyak tergolong miskin karena, banyak dari kepala dusunnya yang mengiginkan untuk keluarga tersebut dimasukkan ke dalam kategori miskin, hal ini disebabkan karena kepala dusun merasa tidak enak terhadap masyarakat jika nantinya ada bantuan masuk dan keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan. Padahal seharusnya dalam satu desa setidaknya persentase kemiskinan lebih rendah ataupun bisa termasuk ke dalam kategori tidak miskin.

Meskipun kemudian masyarakat Serbajadi memang memiliki lahan yang atas kepemilikannya sendiri akan tetapi masih banyak dari masyarakat Serbajadi yang sangat mengingikan dirinya untuk dimasukkan ke dalam kategori keluarga miskin, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat yaitu

“Awalnya kami diberikan perintah oleh pemerintah pusat untuk melakukan regresek yang dimana dalam pelaksanaannya itu ada FKP yang sebagai konsultasi ulang atas data yang sudah didapatkan dari desa, dalam proses FKP inilah kemudian banyak dari masyarakat yang sangat bersikeras untuk dimasukkan kedalam kategori keluarga miskin, bahkan ada juga dari perangkat desa yang kekeh untuk masuk dalam keluarga miskin ini, oleh karena itu pada awalnya persentase kemiskinan di Serbajadi ada kurang lebih 52%, akan tetapi angka ini masih sangat banyak, jika langsung dilaporkan kepada pihak-pihak yang memang ikut serta dalam pendataan ini pasti akan adanya instansi yang tidak terima, oleh karena itu kemudian kami sebagai petugas FKP melakukan kembali survei dan akhirnya ada 47,7% kemiskinan di kecamatan kita.”⁵⁷

⁵⁶. Hasil wawancara dengan bapak Samsuddin selaku Sekretaris Camat, pada tanggal 23 Juni 2023

⁵⁷. Hasil wawancara dengan bapak Samsuddin selaku Sekretaris Camat, pada tanggal 23 Juni 2023

Regrosek merupakan registrasi sosial ekonomi yang merupakan Upaya pemerintah dalam membangun data kependudukan tunggal satu satu desa. Dimana dalam melakukan pendataan tersebut juga bekerja sama dengan aparat. Pendataan tersebut dilakukan dengan cara melihat keluarga tersebut apakah masuk ke dalam 4 kategori miskin yang dikatakan oleh Sekretaris Camat.

Dari segi penilaian koordinator PKH Kecamatan Serbajadi, beliau mengatakan bahwasannya

“Keadaan kemiskinan yang ada di Kecamatan Serbajadi merupakan sebuah keadaan dimana akses kebutuhan masyarakat belum semua terpenuhi baik dari segi akses sosial media, transportasi, dan lainnya. Keadaan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Serbajadi masih bisa dikatakan miskin menengah dan miskin pengetahuan, dikarenakan akses kecamatan yang terisolisir. Akan tetapi jika dilihat kemiskinan dari segi lahan tanah yang dimiliki oleh hampir rata-rata masyarakat di Kecamatan Serbajadi setiap Kartu Keluarga yang ada mempunyai lahan paling kurang 2 Hektar luasnya.”⁵⁸

Jenis lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Serbajadi yaitu terdiri dari jenis komoditas padi sawah, kelapa, sawit, kakao, hortikultura, tambak dan karet. Meskipun masyarakat Serbajadi banyak yang kemudian memiliki lahan berhektar akan tetapi penghasilan yang didapat dari lahan tersebut tidaklah menetap ataupun tidak menentu. Dikarenakan waktu mereka mengisi lahan baik itu dengan Pinang, Coklat, Cabe dan lain sebagainya, penghasilan yang didapat tidak menentu. Seperti akan adanya harga dari barang tersebut yang sangat murah, tidak tumbuh subur karena cuaca dan adanya hewan-hewan lain di lahan tersebut yang dapat merusak tanaman masyarakat. Karena rendahnya penghasilan yang didapat

⁵⁸. Hasil wawancara dengan Syamratul Achwan sebagai Koordinator Kecamatan Serbajadi, pada tanggal 20 Juni 2023

dari lahan tersebut membuat keluarga miskin tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan anaknya.

Oleh karena itu untuk meringankan fasilitas pertanian masyarakat peneliti mengatakan bahwasannya

“Meskipun kemiskinan akan selalu ada di tempat kita ini, kami sebagai aparat desa yang juga bertugas untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat kami agar tidak ada yang merasakan tidak makan dan kekurangan gizi. Dalam beberapa tahun jabatan saya ini, alhamdulillah kami ada memberikan fasilitas untuk perlengkapan pertanian masyarakat kami. Seperti Mesin Semprot dan Gerobak Sorong bagi setiap kartu keluarga. Bantuan ini kami berikan untuk meringankan pelaksanaan pertanian mereka. Kami berharap dengan kami berikannya bantuan tersebut bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kami dari segi pendapatannya untuk membeli makanan, pakaian dan lain-lain”.⁵⁹

Fasilitas pertanian tersebut diberikan karena memang sudah hak bagi masyarakat untuk mendapatkannya. Sebab dana yang didapatkan untuk pembelian Mesin semprot dan gerobak sorong adalah dari dana anggaran ketahanan pangan. Anggaran ini digunakan untuk mengembangkan budi daya pertanian, penguatan infrastruktur, subsidi untuk pupuk, sarana prasarana pertanian, subsidi bunga kredit serta sarana prasarana lain seperti jalan. Namun hal yang paling berguna untuk masyarakat yang memiliki lahan pertanian, maka sudah tepat penggunaan dana anggaran tersebut diberikan untuk sarana pertanian masyarakat. Sebab jika dilihat dari perekonomiannya mungkin masih bisa dikatakan banyak yang belum mampu membelinya, dengan adanya diberikan sarana tersebut maka bisa meringankan kebutuhan pertanian masyarakat.

Oleh karena itu kemudian Sekretaris Camat mengatakan bahwasannya

⁵⁹. Hasil wawancara dengan Bapak Tarmihim selaku Kepala Desa Umah Sunti, pada tanggal 20 Juni 2023

“Lahan yang dimiliki oleh masyarakat bukan menjadi sebuah patokan untuk mereka kemudian mengkategorikan keluarga miskin, karena penghasilan dari lahan pertanian tersebut tidak selamanya ada dan tumbuhan di lahan tersebut juga memiliki musimnya masing-masing. Jika hasilnya bagus maka keluarga yang memiliki lahan tersebut akan mendapatkan untung banyak, namun jika cuaca dan keadaan tanah yang tiba-tiba tidak bagus maka harus terima apa pun hasilnya, oleh karena itu kami tidak mengkategorikan luas lahan sebagai kategori kemiskinan, karena penghasilan yang didapatkan bukan penghasilan yang tetap.”⁶⁰

Masyarakat Serbajadi yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, masyarakat juga masih banyak yang mengharapkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, karena bagi mereka hal tersebut merupakan sebuah bantuan yang dapat membantu kebutuhan hidup mereka, meskipun nominal yang diberikan mungkin hanya Rp.100.000 namun itu merupakan hal yang sangat berarti bagi mereka. Karena keadaan lahan pertanian yang mereka miliki tidak selamanya juga mendapatkan keuntungan finansial yang banyak atau bisa dikatakan penghasilannya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan penerima PKH yang mengatakan bahwa

“Jika hanya berharap dari penghasilan suami saya yang terkadang sebagai tukang upah, itu tidaklah cukup namun bagaimanapun hal tersebut harus disyukuri karena memang sudah rezekinya segitu.”⁶¹

Begitulah masih keadaan kemiskinan yang ada di Kecamatan Serbajadi, profesi sebagai tukang upah bukan lagi satu hal yang sukar dilihat di lingkungan Serbajadi karena hampir dari seluruh petani, hampir semuanya melakukan pekerjaan tersebut. Karena keadaan ekonomi juga yang memang membuat mereka harus tetap mencari rezeki, belum lagi untuk lowongan pekerjaan di Kecamatan

⁶⁰. Hasil wawancara dengan bapak Samsuddin selaku Sekretaris Camat, pada tanggal 23 Juni 2023

⁶¹. Hasil wawancara dengan Ibu Sumatra selaku Penerima PKH Kecamatan Serbajadi, pada tanggal 25 Juni 2023

Serbajadi sangat sedikit. Hasil wawancara dengan kepala desa Umah Sunti menyatakan:

“Masyarakat kita memang memiliki penghasilan yang sedikit bahkan sangat minim jika dijadikan sebagai tumpuan hidup, oleh karena itu kemudian kami menyediakan bahan fasilitas pertanian kepada mereka agar bisa menjadikan lahannya sebagai lahan yang memiliki penghasilan yang tinggi. Karena untuk program bantuan biasanya mereka akan saling sindir-menyindir apalagi seperti jumlah nominal PKH ada yang tidak tau tentang kriteria nominal tersebut dan banyaklah lainnya yang membuat mereka kadang tidak akur. Makanya jika ada fasilitas pertanian dibagikan merata kepada setiap kepala keluarga maka mereka kemudian mereka merasakan keadilan.”⁶²

Keadaan kemiskinan di Kecamatan Serbajadi bisa dikatakan sebagai kemiskinan yang kultural karena memang benar masih adanya masyarakat yang memiliki etos kerja yang kurang, bahkan masih ada yang hanya mengharapkan program bantuan sosial dari pemerintah sebagai kebutuhan hidupnya. Seharusnya mereka bisa memanfaatkan lahan yang mereka miliki sebagai salah satu penghasilannya untuk meningkatkan taraf hidupnya agar tidak tergantung dengan program bantuan sosial lain. Meskipun ada juga masyarakat yang tidak menginginkan keadaan kemiskinan menimpa hidupnya akan tetapi hal tersebut juga tidak bisa dirubah jika memang dari dirinya tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

Dari berbagai penemuan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dari segi program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah masih ada dari masyarakat yang sangat membutuhkan akan tetapi dari segi infrastktur dan sarana lahan yang dimiliki masyarakat mereka belum bisa menggunakannya dengan baik. Sebab

⁶². Hasil wawancara dengan Bapak Tarmihim selaku Kepala Desa Umah Sunti, pada tanggal 20 Juni 2023

masih kurangnya fasilitas untuk pengembangan lahan yang mereka miliki. Dari segi pendapatan yang didapat masih ada pendapatan mereka dari hasil sebagai buruh yang dimana pendapatan tersebut hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

4.4 Pengaruh PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Bantuan PKH merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan bagi lansia. Oleh karena itu kemudian seluruh KPM PKH berhak untuk mendapatkan program bantuan komplementer di bidang Kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial PKH. Program-program tersebut antara lain adalah Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Sembako, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), Asistensi Rehabilitasi Sosial dan bantuan sosial lainnya sesuai kebijakn pemerintah.⁶³

Program Bantuan PKH yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, sebab jika keluarga miskin memiliki penghasilan yang kecil tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan. Sebagai contoh akses Kesehatan jika ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan Kesehatan yang memadai, maka hal ini akan berakibat buruk pada kondisi Kesehatan dan asupan gizi bayinya yang dalam kandungan. Dalam hal Pendidikan Apabila perekonomian suatu keluarga kurang bagus maka proses Pendidikan anaknya juga menjadi

⁶³. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, "*Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*", 2021, Hlm. 36

terhambat, hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan partisipasi Pendidikan anaknya yang putus sekolah sebab keterbatasan ekonomi.⁶⁴

Seluruh KPM PKH memiliki kewajiban yaitu :

1. Pada komponen Kesehatan yang terdiri dari ibu hamil/nifas/ menyusui dan anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib untuk memeriksa Kesehatan fasilitas serta layanan Kesehatan sesuai dengan protokol Kesehatan;
2. Pada komponen Pendidikan yang terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif;
3. Pada komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berta, wajib unyuk mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali;
4. KPM juga wajib hadir dalam pertemuan atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan;
5. Seluruh anggota KPM haru memenuhi kewajibannya kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
6. KPM PKH yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenakan sanksi.⁶⁵

Dengan adanya program bantuan PKH ini lebih bisa meringankan kebutuhan hidup masyarakat dalam melanjutkan pendidikan anaknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga

⁶⁴. *Ibid* Hlm. 13

⁶⁵. *Ibid*, hlm. 24

Harapan pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwasannya pemberian bantuan sosial ini sebagai salah satu kerja pada kementerian/Lembaga pada pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, Jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar.

Salah satu teori Strategi penanggulangan kemiskinan yaitu oleh Bank Dunia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1950-an dan 1960-an menekankan pada pembangunan fisik dan prasarana sebagai alat utama pembangunan. Pada tahun 1970-an menekankan pada Kesehatan dan Pendidikan. Pada tahun 1980-an berupaya meningkatkan pendapatan rakyat miskin. Pada tahun 1990-an strateginya berupa redistribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dimana selanjutnya agenda kemiskinan terbaru Bank Duni adalah:

- 1) Membuka kesempatan ekonomi kepada golongan miskin dengan melalui program padat karya dan meningkatkan produktivitas usaha kecil dan petani kecil;
- 2) Investasi sumber daya manusia terutama perbaikan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan;
- 3) Pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian.⁶⁶

Dari segi teori strategi penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yaitu salah satunya dalam jangka Pendek dimana ia

⁶⁶. Sudirman, Senthot, et al. "*Analisis Determinan Dan Program Pengentasan Kemiskinan Rumahtangga Petani Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mengatasi Kemiskinan Petani (Studi Di Desa Bogem Kecamatan Bayat, Klaten Jawa Tengah)*." (2011). Hlm, 29

mengatakan bahwasannya perlu adanya sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Dimana didalam hal tersebut yaitu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatam dan memperbaiki distribusinya.

Program bantuan PKH masuk kedalam kategori Bank Dunia dalam investasi sumber daya manusia terutama perbaikan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan. Sebab dalam Bantuan PKH termasuk didalamnya komponen Pendidikan dan Kesehatan. Oleh karena itu, Bantuan PKH yang merupakan bantuan sosial dijadikan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di indonesia. Sebagai program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk ke dalam klaster pertama dalam strategi penanggulangan kemiskinan, program ini juga merupakan bantuan yang diberikan langsung tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan Pendidikan dan Kesehatan.⁶⁷ Penyaluran dana PKH selanjutnya diberikan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan dengan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang telah ditetapkan oleh Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam satu tahun anggaran pemberian PKH ada 4 tahap pembagian atau diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 bulan sekali.

Setiap keluarga mendapatkan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah anaknya ataupun syarat serta kriteria yang telah diberikan oleh pemerintah. PKH ini kemudian hadir di kecamatan serbajadi dan menjadikan bantuan ini suatu hal yang sangat disenangi masyarakat. Terutama pada saat pandemi lalu dimana

⁶⁷. Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan(PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Tesis 2016, hlm. 68

memang perekonomian sedang tidak baik. Berikut ini jumlah penerima Alokasi Bantuan Sosial BBM, BNT dan PKH di Kecamatan Serbajadi;

**ALOKASI BANSOS BBM BNT & PKH
KECAMATAN SERBAJADI**

NO	GAMPONG	ALOKASI	REALISASI	GAGAL
1	ALUR DRIEN	48	45	3
2	BUNIN	150	149	1
3	JERING	61	59	2
4	LELES	59	59	
5	LOKOP	64	64	
6	LOOT	60	60	
7	MESIR	39	39	
8	NALON	56	56	
9	RAMPAH	76	75	1
10	SEKU ALAN	53	53	
11	SEMBUANG	37	37	
12	SELEMAK	47	46	1
13	SUNTI	64	63	1
14	TERUJAK	64	64	
15	TUALANG	49	48	1
16	UJUNG KARANG	37	37	
17	UMAH TARING	22	22	
JUMLAH		986	976	10

Gambar 4.2 Penerima Alokasi Bansos BBM, BNT dan PKH Serbajadi

Program bantuan PKH ini dilayani oleh tenaga kesejahteraan sosial yang telah dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang bekerja di ruang lingkup kegiatan kesejahteraan sosial dan diprioritaskan kepada yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁶⁸

Pengaruh PKH yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat membuat kebutuhan masyarakat terpenuhi dari segi finansialnya, karena nominal yang diberikan pemerintah juga sangat memadai untuk digunakan sebagai biaya untuk Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan lainnya. Bapak Achwan selaku Koordinator PKH Kecamatan Serbajadi mengatakan

⁶⁸. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, BAB I pasal 1 dan 2.

“Bantuan PKH juga berhasil sebagai program penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah, karena hampir semua rata-rata ekonomi masyarakat terpenuhi serta anaknya juga bisa bersekolah dengan adanya bantuan PKH. Bantuan PKH juga berdampak besar bagi kehidupan masyarakat hampir 95% kehidupan masyarakat mulai terpenuhi dan berubah mulai dari segi Pendidikan anaknya. Hal tersebut dikarenakan pendamping PKH rutin melakukan perubahan perilaku masyarakat melalui P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dimana mereka menyampaikan materi dengan berbagai macam model modul.⁶⁹”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gampong Nalon, beliau mengatakan bahwasannya

“PKH sudah tepat sarannya sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ada di masyarakat, akan tetapi meskipun sudah tepat masih banyak juga keluarga miskin yang teridentifikasi setiap tahunnya. Oleh karena itu jika PKH saja yang dijadikan sebagai program penanggulangan kemiskinan tidak bisa dikatakan berhasil 100%, seharusnya ada bantuan sosial lain yang memang dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan yang ada.”⁷⁰

Meskipun PKH berhasil menjadi program penanggulangan kemiskinan, akan tetapi PKH juga tidak berhasil menjadi program penanggulangan kemiskinan, yang artinya meskipun PKH sarannya sudah tepat sebagai penanggulangan akan tetapi perekonomian masyarakat masih bisa dikatakan kurang dan bahkan tidak sedikit dari masyarakat juga sangat mengharapkan bantuan program sosial lain yang dapat membantu kehidupan serta kebutuhan masyarakat.

Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia muncul mengiringi kompleksitas perkembangan struktur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan selain untuk meningkatkan pendapatan orang miskin, harus pula menyertakan nilai-nilai budaya

⁶⁹. Hasil wawancara dengan Syamratul Achwan sebagai Koordinator Kecamatan Serbajadi, pada tanggal 20 Juni 2023

⁷⁰. Hasil wawancara dengan Bapak Muhtadi selaku Kepala Desa Nalon, pada tanggal 24 Juni 2023

sebagai modal dasar semangat dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri.⁷¹ Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan. Mulai dari program yang ditujukan untuk petani, melalui berbagai skim kredit dan subsidi, sampai pada berbagai program pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti dana bergulir, program ekonomi produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.⁷²

Oleh karena itu program bantuan PKH yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta memberikan akses pelayanan dari berbagai akses, PKH di Kecamatan Serbajadi berhasil di akses Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima PKH mereka mengatakan bahwasannya

“Jika bisa dikatakan kami kurang puas terhadap nominal yang diberikan dengan kondisi Pendidikan anak juga ada lebih dari 1 yang bersekolah, terkadang uang tersebut hanya cukup untuk buku, sepatu dan untuk seragam kadang masih kurang. Mengingat juga saat ini kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal, namun walau bagaimanapun kami tetap bersyukur dengan adanya bantuan tersebut diberikan kepada kami. Terkadang kami juga ingin mendapatkan bantuan lebih selain PKH ini, seperti keluarga lain yang mendapatkan 2 program bantuan sekaligus. Kami berharap demikian karena kami merasa itu hak kami sebagai keluarga miskin yang tinggal di pedalaman dengan kondisi kebutuhan hidup yang mahal. Sedangkan jika hanya berpatokan dari penghasilan suami itu belum cukup.”⁷³

Penerima PKH yang telah diberikan bantuan tersebut tidak puas akan nominal bantuan, padahal nominal bantuan yang diberikan dari PKH ini disesuaikan dengan kriteria dan syarat yang sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial

⁷¹. Arifin, Johan, "*Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*", hlm. 128

⁷². Yasa, IGW Murjana. "*Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali.*" *None* 1.2 (2008): 43814, hlm. 88

⁷³. Hasil wawancara dengan Ibu Sumatra selaku Penerima PKH Kecamatan Serbajadi, pada tanggal 25 Juni 2023

untuk para penerima KPM KPM. Ibu Jemat yang merupakan penerima PKH dan juga penerima Sembako, beliau mengatakan bahwasannya

“Terkadang jika keadaan ekonomi sedang sangat sulit memang harapan yang paling besarnya adalah bantuan tersebut. Dari adanya bantuan tersebut seiring berjalannya waktu anak kami juga mulai semakin termotivasi untuk belajar karena sudah memiliki sepatu yang bagus, buku yang bisa dibeli pada saat waktunya. Sehingga untuk belajarpun anak kami sekarang semakin bersemangat.”⁷⁴

Saat ini PKH juga mulai memberikan beras dengan berta 10 Kg bagi tiap penerima PKH, bantuan beras ini mulai ada sejak bulan April 2023 bertepatan dengan bulan Ramadhan. Sebagai program penanggulangan kemiskinan PKH berhasil menjadi salah satu program bantuan untuk pendidikan anak yang ada di Serbajadi, akan tetapi jika sebagai penanggulangan kemiskinan guna untuk mengurangi angka kemiskinan hal tersebut belum berhasil, sebab jumlah kk miskin yang dari tahun ke tahun bertambah.

Dalam pembagian PKH ini masih ada keluarga miskin yang tidak masuk kategori penerima PKH, akan tetapi keluarga tersebut mendapatkan bantuan sosial lain seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wahdah selaku penerima BLT yaitu

“Terkadang saya juga menginginkan agar bisa mendapatkan bantuan PKH tersebut, akan tetapi mengingat keadaan saya sekarang yang masih bisa dibilang untuk mampu dalam membeli makanan sehari-hari, saya bersyukur dari adanya diberikan bantuan BLT dari desa meskipun sekarang pemberiannya hanya 3 bulan sekali. Tetapi itu patut disyukuri karena masih ada keluarga yang lebih pantas mendapatkan bantuan untuk PKH tersebut”⁷⁵

⁷⁴. Hasil wawancara dengan Ibu Jemat selaku penerima PKH Kecamatan Serbajadi, pada tanggal 25 Juni 2023

⁷⁵. Hasil wawancara dengan Ibu Wahdah sebagai penerima BLT, pada tanggal 22 Juni 2023

Meskipun kepala desa mengatakan bahwasannya untuk PKH ini tidak berhasil untuk mengurangi angka kemiskinan akan tetapi, mereka kemudian tetap memberikan bantuan lain untuk masyarakatnya dalam bentuk lain. Bapak Tarmihim mengatakan

“Meskipun ada banyak bantuan sosial yang datang dari pemerintah pusat baik itu berupa uang tunai, sembako dan lain sebagainya. Itu masih kurang bagi masyarakat sebab kebutuhan hidup mereka juga tinggi, belum lagi masyarakat kita ini memiliki keluarga ataupun anak yang banyak, maka diperlukan pendapatan yang tinggi untuk keluarganya sendiri. Oleh karena itu untuk dana anggaran ketahanan pangan kami memberikan fasilitas pertanian yang lengkap, agar masyarakat lebih mudah untuk mengelola lahan pertaniannya”.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwasannya masyarakat Serbajadi tentunya sudah mulai tergantung dengan keberadaan program bantuan yang datang dari pemerintah. Meskipun pada dasarnya dalam Keluarga miskin yang merupakan keluarga yang berhak menerima PKH ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak Kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya, juga harus mampu berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.⁷⁷

Oleh karena itu selain mendapatkan bantuan dari pemerintah mereka juga harus mampu bertanggung jawab atas dirinya, artinya tidak pasrah dengan keadaan kemiskinan yang dialaminya, sebab tanpa usaha ingin meningkatkan kualitas hidup keluarganya sendiri hanya berharap dari bantuan pemerintah maka itu juga bentuk dari kepasrahan akan kemiskinannya. PKH sebagai program penanggulangan kemiskinan hanya berhasil telah berhasil meningkatkan mutu Pendidikan dan hal

⁷⁶. Hasil wawancara dengan Bapak Tarmihim selaku Kepala Desa Umah Sunti, pada tanggal 20 Juni 2023

⁷⁷. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 4

tersebut merupakan salah satu keberhasilan dari pemerintah dalam mengurangi angka anak yang banyak putus sekolah.

Sebagai salah satu program bantuan jangka Panjang, PKH berhasil meningkatkan mutu Pendidikan anak di Serbajadi, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH yang hampir 96% kehidupan masyarakat mulai terpenuhi. Akan tetapi dari masyarakatnya sendiri masih tergantung pada bantuan pemerintah dan juga masih ada masyarakat yang malas untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam bermasyarakat ataupun dia sangat menginginkan bantuan untuk dirinya.

Dari segi Pendidikan PKH berhasil dalam meningkatkan investasi sumber daya berdasarkan dengan teori strategi penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Dari angka kesehatannya yaitu angka stunting masih ada sebanyak 180 penderita stunting, yaitu dimulai dari gizi buruk dan stunting kategori pendek. Dari 803 balita yang ada di Kecamatan serbajadi ada sebanyak 0,22% yang mengalami stunting dalam tahun 2022-2023. Dimana dari segi PKH sendiri komponen Kesehatan diberikan untuk Kesehatan Ibu Hamil dan anak usia dini agar dapat hidup dengan sehat.

Berdasarkan data yang didapat dari Kecamatan Serbajadi dalam angka 2015 dan kecamatan serbajadi dalam angka 2022 peneliti kemudian melakukan perbandingan tingkat Pendidikan anak serta anak-anak yang tidak bersekolah Adapun data tersebut yaitu:

Kategori Pendidikan	Tahun 2015	Tahun 2016
TK/PAUD	30 Siswa	150 Siswa
SD	1160 Siswa	1135 Siswa
SMP	421 Siswa	642 Siswa
SMK	178 Siswa	200 Siswa
Jumlah	1789 Siswa	2127 Siswa

Berdasarkan jumlah umur rata-rata dalam menempuh Pendidikan yaitu dari umur 5-19 tahun maka pada tahun 2015 ada sebanyak 2005 peserta didik yang seharusnya ada. Sedangkan pada tahun 2022 umur 5-19 tahun ada sebanyak 2391 peserta didik yang ada. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung jumlah yang tidak melaksanakan pendidikannya yaitu pada tahun 2015 ada 216 Jiwa dan tahun 2022 ada sebanyak 264 Jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dari segi Program bantuan PKH yang masuk ke Serbajadi pada tahun 2015 dan sampai saat ini menimbulkan peningkatan Pendidikan anak.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bank Dunia tentang strategi penanggulangan kemiskinan yaitu salah satunya investasi sumber daya manusia terutama perbaikan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan. Dimana melalui PKH kedua komponen tersebut ada. Untuk Pendidikan sudah dapat dilihat dari angka yang disebutkan diatas tadi sedangkan dari segi Kesehatan dapat dilihat dari persentase stunting anak yang ada di Serbajadi.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Informan terkait Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan yang ada di Serbajadi masih bisa dikatakan miskin menengah dan minim pengetahuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator PKH
2. Sebagai program penanggulangan kemiskinan jangka Panjang PKH ini berhasil dalam meningkatkan mutu Pendidikan anak yang ada di Serbajadi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kebutuhan masyarakat terpenuhi dari segi pendidikannya ada sebanyak 95% kehidupan masyarakat berubah setelah adanya PKH yang hadir di Kecamatan Serbajadi. Pendidikan berhasil menjadi salah satu keberhasilan dari PKH sebagai penanggulangan kemiskinan. Sebab dari adanya pendidikan lambat laun masyarakat akan mengembangkan dirinya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin modern. Dan juga berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh Bank Dunia tentang Strategi penanggulangan kemiskinan dalam meningkatkan investasi sumberdaya manusia.
3. Masyarakat Serbajadi masih sangat tergantung dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, hal itu bisa dilihat dari hasil wawancara dengan

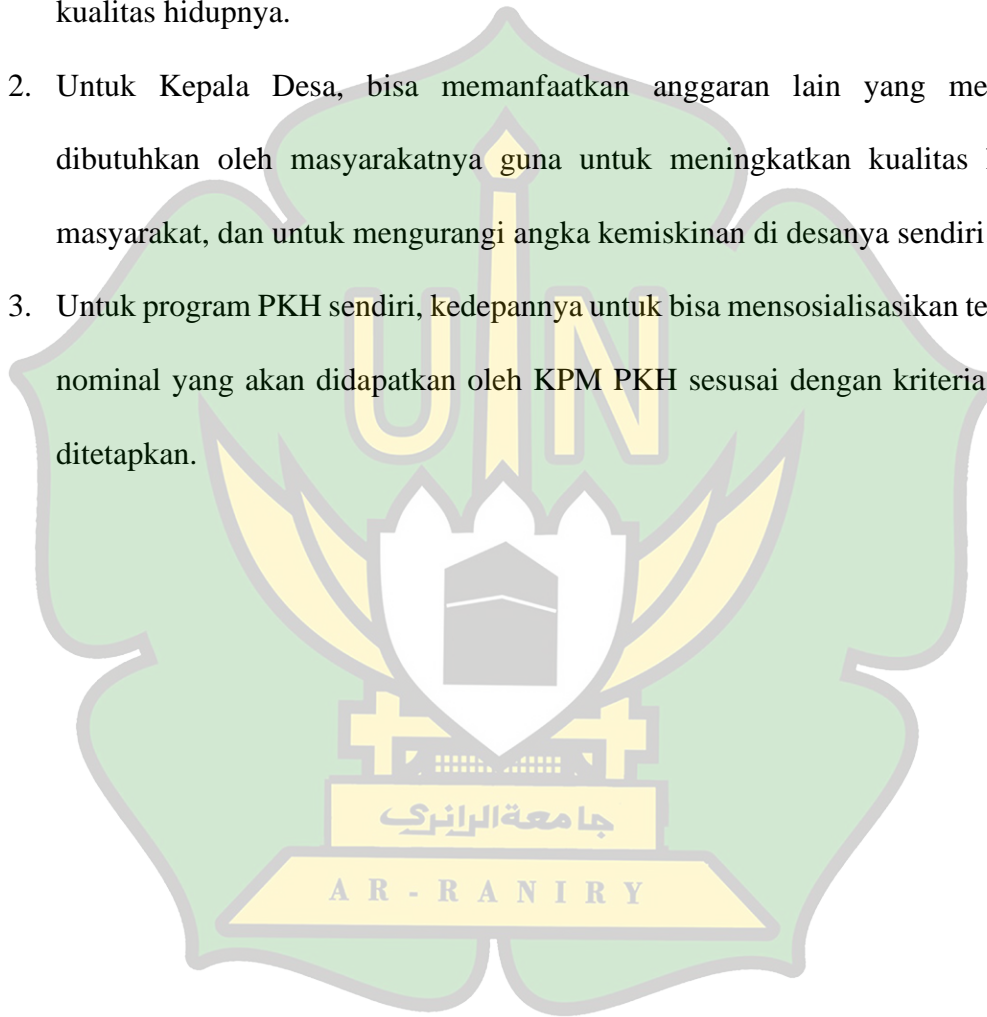
penerima PKH dan yang bukan penerima PKH, dimana mereka masih menginginkan bantuan lebih selain PKH. Padahal seharusnya mereka juga harus bisa bertanggung jawab untuk kebutuhan hidupnya dan memiliki semangat kerja agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Serta dari hasil wawancara dengan sekretaris camat yang mengatakan bahwasannya banyak dari masyarakat yang tetap bersikeras untuk masuk dalam kategori keluarga miskin dalam proses FKP pada tahun 2022. Hal ini termasuk kedalam penyebab masyarakat mengalami kemiskinan dimananya tidak ingin mengembangkan dirinya dengan adanya lahan yang dimiliki sendiri misalnya.

4. Dari segi kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat tidak semuanya bisa menjadikan perekonomian masyarakat meningkat karena pendapatan yang didapat dari lahan tersebut bukanlah pendapatan yang menetap atau memang memiliki penghasilan yang sangat minim. Meskipun masyarakat memiliki lahan yang luas, namun masih ada diantara mereka yang menjadi tukang upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari segi pendapatan ini dapat melihat dari teori Gunnar Adler Karlsson yaitu dalam meningkatkan pendapatan. Dimana masyarakat belum bisa menjadikannya sebagai tempat untuk meningkatkan perekonomian.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan yaitu:

1. Untuk Masyarakat, perlu adanya bentuk rasa syukur dari bantuan PKH yang sudah diberikan dalam berapa tahun ini, jangan selalu tergantung akan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, seharusnya mereka juga bisa memiliki tanggung jawab untuk keluarga dan dirinya sendiri dalam meningkatkan taraf kualitas hidupnya.
2. Untuk Kepala Desa, bisa memanfaatkan anggaran lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakatnya guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan untuk mengurangi angka kemiskinan di desanya sendiri.
3. Untuk program PKH sendiri, kedepannya untuk bisa mensosialisasikan tentang nominal yang akan didapatkan oleh KPM PKH sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Suryo Setyantoro dkk (2022). "*Bunin: Gampong Budaya di Aceh Timur*".
Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh.
- Arifin, J. (2020). *Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. 6(2), 114-132.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistika (2015). *Katalog: Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2015*.
Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Timur.
- Darmiyanti, R. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020*.
JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 5(2), 108-123.
- Dhian Afrida, Muthia (2013). *Studi Pemikiran H.A.R. Tilaar Terhadap Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Direktorat Jaminan Sosial (2021). Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.
- Ela Olanda dkk (2019). *Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Kemiskinan di Desa Mekar sama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna*. Neo societal 4(1). (584-590)
- Enny Febriana (2010). *Strategi untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin di Perdesaan: Studi Kasus pada Rumah Tangga Petani*

- Miskin di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi*. Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Fachrudin, R. (2015). *Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah kota Balikpapan*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 4(2).
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Halim, W. (2018). *Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang*. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3(1), 43-55.
- Hermawati, I. (2017). *Pengukuran konstrak kemiskinan di Indonesia*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 41(3), 269-284.
- Huraerah, A. (2013). *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. 12(1), 3-13.
- Ignes, Novirensi (2016). *Hambatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah tangga miskin di Ngari Kumango Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan*. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kadji, Y. (2012). *Kemiskinan dan Konsep teoritisnya*. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG*, 1-7.
- Mawarni, Kahfi Septian (2019). *Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat oleh Pendamping Program*

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ciomas Kecamatan Panajalu Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmua Administrasi Negara, 6(3).

Musliyadi, (2022). *Katalog: Kecamatan Serbajadi dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Timur.

Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). *Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi*. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 3(1), 12-24.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Noorikhsan, F. F., & Gunawan, H. (2022). *Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik*. Journal of Government and Politics (JGOP), 4(2), 133-154.

Nugrahi, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1).

Pertiwi, I. P., Ferdinandus, F. X., & Limantara, A. D. (2019). *Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting*. CAHAYA tech, 8(2), 182-195.

Pradikta, E. P. (2013). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*. Publika, 1(3).

Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

- Ramadhanty, Annisa.(2022). *Katalog: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Timur 2022*. Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Timur.
- Rosliya, Wa Ode. (2016). *Perspektif Islam Terhadap Budaya Kabuenga Di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*. Sifdahkripsi Thesis, Iain Kendari.
- Sahib, M. (2021). *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics, 1(2), 1-13.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3(2), 68-74.
- Sudarmo. (2021). *Kemiskinan dari Segi Politik*. Mata Kuliah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. 2021. Univesitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sudirman, S., Indradi, I. G., Sriyono, A., & Prayitno, A. (2011). *Analisis Determinan Dan Program Pengentasan Kemiskinan Rumah tangga Petani Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mengatasi Kemiskinan Petani (Studi Di Desa Bogem Kecamatan Bayat, Klaten Jawa Tengah)*.
- Sugiyana, R., Kurniansyah, D., & Rizki, M. F. (2022). *Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Rengasdengklok*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1).

Suheri, E. (2011). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau).

Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 88-92.

Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). *Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal*. Cross-border, 5(1), 782-791.

Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). *Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng*. Jurnal Eksekutif, 3(3).

Yasa, I. M. (2008). *Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali*. None, 1(2), 43814.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 2011 tentang “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II”

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Internet :

Akhyar. *450 Keluarga Program Keluarga PKH di Aceh Timur Terima Kartu Bansos*. 26 Agustus 2021. Diakses pada tanggal 25 September 2022 dari situs: <https://dialeksis.com/aceh/450-keluarga-program-pkh-di-aceh-timur-terima-kartu-bansos/>

Badan Pusat statistika. *Persentase Penduduk Miskin September Naik Menjadi 9,57 Persen*. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023 dari situs: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>

Badan Pusat Statistika. *Profil Kemiskinan Penduduk di Provinsi Aceh September 2022*. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023 dari situs: <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/713/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-september-2022.html>

Humas. *Meningkatnya Angka Kemiskinan di Indonesia*. 01 April 2023. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023 dari situs: <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/meningkatnya-angka-kemiskinan-di->

Wawancara :

Wawancara dengan Kepala Desa Nalon, Bapak Muhtadi pada Tanggal 24 Juni 2023

Wawancara dengan Kepala Desa Umah Sunti, Bapak Tarmihim pada Tanggal 20 Juni 2023

Wawancara dengan Koordinator PKH Kecamatan Serbajadi, Bapak Syamratul Achwan pada Tanggal 20 Juni 2023

Wawancara dengan Sekretaris Camat Serbajadi, Bapak Samsuddin pada Tanggal 23 Juni 2023

Wawancara dengan Penerima PKH Ibu Jemat dan Ibu Sumatra pada Tanggal 25 Juni 2023

Wawancara dengan Bukan Penerima PKH Ibu Wahdah pada Tanggal 22 Juni 2023



LAMPIRAN

1. Instrumen Pertanyaan Penelitian

No	Status Informan	Pertanyaan
1	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja profesi serta budaya masyarakat di desa ini? 2. Bagaimana menurut anda tentang kemiskinan yang terjadi di desa ini ? 3. Apa saja upaya penanggulangan kemiskinan yang diterapkan untuk desa? 4. Bagaimana bapak mengategorikan para penerima PKH? 5. Apakah PKH berhasil menjadi program penanggulangan kemiskinan?
2	Koordinator PKH Kecamatan Serbjadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut anda tentang bantuan PKH? Apakah sudah sesuai kriteria atau syarat yang diberikan oleh pemerintah? 2. apakah menurut saudara/i PKH berhasil menjadi program penanggulangan kemiskinan di kecamatan serbjadi? 3. Seberapa besar pengaruh atau dampak PKH terhadap kehidupan masyarakat selama adanya PKH? 4. Apa saja kendala saudara/i selama menetapkan penerima PKH? 5. Bagaimana tanggapan saudara/i tentang kemiskinan yang ada di kecamatan Serbjadi?

3	Sekretaris Camat	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana keadaan kemiskinan yang ada di Kecamatan Serbajadi? 3. Mengapa angka kemiskinan di Serbajadi Tinggi padahal setiap keluarga memiliki lahan yang luas? 4. Apakah kemiskinan yang terjadi di Serbajadi disebabkan oleh internal masyarakat sendiri? 5. Apakah program bantuan sosial yang diberikan pemerintah berhasil menjadi program penanggulangan kemiskinan di Serbajadi?
4	Penerima PKH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah saudara/i merasa puas terhadap nominal yang didapatkan dari PKH? 2. Bagaimana jika PKH tersebut ditiadakan? 3. Seberapa besar harapan saudara/i terhadap program PKH? 4. Apakah dengan adanya PKH tersebut perekonomian saudara/i menjadi lebih baik? 5. Bagaimana selama ini saudara/i mengelola uang yang diberikan dari PKH?

5	Bukan Penerima PKH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan saudara/i tentang penerima PKH apakah sudah sesuai dengan sebagaimana semestinya? 2. Apakah pernah terbesit dibenak saudara/i agar bisa menjadi penerima PKH? 3. Jika dilihat dari penghasilan saudara/i apakah anda merasa berhak untuk menjadi penerima PKH? 4. Apakah ada bantuan pemerintah yang lain yang anda dapatkan selain tidak menjadi penerima PKH? 5. Apakah saudara/i pernah mengajukan diri kepada kepala desa agar bisa menerima bantuan PKH tersebut?
6	Petugas Pembagi Uang PKH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut anda tentang pembagian PKH yang ada di kecamatan Serbajadi? 2. Apakah pernah ada yang mengeluhkan tentang permasalahan teknis penerima PKH kepada anda? 3. Bagaimana anda kemudian menyikapi masyarakat yang mengeluhkan dirinya bahwa dia sebenarnya berhak menerima PKH? 4. Bagaimana menurut anda tentang jumlah para penerima PKH selama ini? 5. Jika bantuan PKH sudah cair bagaimana cara saudara/i biasanya untuk memberikan informasi tersebut kepada para penerima PKH?

2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Nalon



Gambar 2. Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Camat Serbajadi



Gambar 3. Wawancara Peneliti dengan Petugas Pembagi Uang PKH Serbajadi



Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Penerima PKH Ibu Jemat



Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Penerima PKH Ibu Sumatra



Gambar 6. Wawancara Peneliti dengan Koordinator PKH Kecamatan Serbajadi



Gambar 7. Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Umah Sunti



Gambar 8. Budaya Nangal



Gambar 9. Wawancara peneliti dengan penerima BLT (bukan penerima PKH)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 407/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **11 Januari 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Aklima, S.FIL.I., MA : Sebagai pembimbing pertama
 2. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A : Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Jainatul Mawarni
 NIM : 190801018
 Program Studi : Ilmu Politik
 Judul : Pembagian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Serbajadi)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 07 Februari 2023

AR - RANI



An. Rektor
 Dekan,

Muji Mulia

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1209/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kantor Camat Serbajadi Kabupaten Aceh Timur
2. Koordinator PKH Kecamatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JAINATUL MAWARNI / 190801018**
 Semester/Jurusan : VIII (Delapan) / Ilmu Politik
 Alamat sekarang : Lr. Kb, Baet, Baitussalam Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pembagian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kecamatan Serbajadi)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 November
 2023

R - R A N I R Y

Eka Januar, M.Soc.Sc.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN SERBAJADI
 Jln. Peurelak – Lokop km. 86 kode pos. 24461
 Telp..... faximile.....

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 420 / 131 / 2023

1. Sehubungan dengan Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B-1209/Un.08/FISIF.I/PP.00.9/06/2003, Tanggal 06 Juni 2023. Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah.
2. Camat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama	: JAINATUL MAWARNI
Nim	: 190801018
Jurusan/Prodi	: Ilmu Politik
Semester	: Genap
3. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami perbuat dengan sebenarnya, agar di pergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Lokop, 26 Juni 2023

Am. CAMAT SERBAJADI
 Plt. Sekretariat Kecamatan



A.C. SAMSUDDIN, SE

NIP. 19750627 200901 1 005

AR-RANIRY

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Jainatul Mawarni
2. Tempat/Tanggal Lahir : Nalon, 04 Agustus 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Lr. KB, Krueng Cut, Baitussalam, Aceh Besar
6. Orang Tua,
 - a. Nama Ayah : Sarbuddin
 - b. Nama Ibu : Juniar
 - c. Alamat : Nalon, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur
7. Riwayat Pendidikan,
 - a. SD Negeri 1 Lokop, Aceh Timur
 - b. MTSs Nurul Ulum Peureulak, Aceh Timur
 - c. MAS Jeumala Amal Lueng Putu, Pidie Jaya
8. Pengalaman Organisasi, **جامعة الرانيري**
 - a. Ketua Badan Usaha Milik Jurusan Himapol Fisip UIN Ar-raniry Periode 2022-2023

